

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Pembangunan Pertanian Kecamatan Bonang**

Kondisi pembangunan pertanian di Kecamatan Bonang dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya adalah kondisi geografis, potensi sumberdaya, tingkat produksi, dan ketersediaan komponen pendukung serta aspek-aspek yang lainnya. Kondisi geografis dimaksudkan untuk mengetahui kondisi wilayah Kecamatan Bonang dilihat dari hal-hal yang berkaitan dengan iklim dan tata letaknya di permukaan bumi. Kondisi geografis ini dapat mempengaruhi pola usahatani yang dijalankan. Aspek potensi sumberdaya dimaksudkan agar diketahui peluang-peluang sumberdaya yang dapat digunakan untuk menentukan strategi pembangunan pertanian Kecamatan Bonang.

Aspek produksi digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pertanian di Kecamatan Bonang dalam memproduksi bahan pangan. Informasi terkait aspek produksi juga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat produktivitas dari pertanian di Kecamatan Bonang. Aspek komponen pendukung dapat menjelaskan tentang ketersediaan komponen yang mendukung dari pembangunan pertanian di Kecamatan Bonang. Aspek komponen pendukung meliputi ketersediaan sarana prasarana pertanian dan kebijakan pembangunan pertanian yang dikeluarkan oleh pelaku pengambil kebijakan.

Pembangunan pertanian di Kecamatan Bonang sendiri tidak terlepas dari peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang bekerja sama dengan pemangku

kebijakan lain di Kecamatan Bonang. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kecamatan Bonang dalam bidang pertanian juga disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan pertanian di tingkat Kabupaten Demak. Peran BPP Kecamatan Bonang dalam hal ini juga memberikan usulan agar pembangunan pertanian di tingkat kecamatan dapat selaras dengan kebijakan pembangunan pertanian oleh Kementerian Pertanian. Koordinasi antara penyuluh BPP Kecamatan Bonang dengan pemerintah Kecamatan Bonang terkait dengan pembangunan pertanian salah satunya dilakukan pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Tingkat Kecamatan Bonang.

Musyawah Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan (MUSRENBANGCAM) merupakan musyawarah yang membahas rencana-rencana pembangunan daerah tingkat kecamatan yang akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya. MUSRENBANGCAM memiliki agenda-agenda pembahasan terkait aspek pembangunan secara umum baik pembangunan fisik maupun non fisik dari berbagai sektor pembangunan di tingkat kecamatan. MUSRENBANGCAM Kecamatan Bonang dihadiri beberapa *stakeholder* (pemangku kebijakan) yang memiliki peran didalam pembangunan di Kecamatan Bonang mulai dari tingkat desa hingga kecamatan termasuk didalamnya adalah adanya keikutsertaan penyuluh BPP Kecamatan Bonang.

Keikutsertaan perwakilan penyuluh BPP Kecamatan Bonang dalam MUSRENBANGCAM agar memberikan rekomendasi rencana pembangunan pada sektor pertanian. MUSRENBANGCAM Kecamatan Bonang dilakukan di

gedung pertemuan kantor Pemerintah Kecamatan Bonang. Kegiatan MUSRENBANG Kecamatan Bonang dapat dilihat pada Ilustrasi 5.



Ilustrasi 5. MUSRENBANG Kecamatan Bonang 2020

Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa MUSRENBANG Kecamatan Bonang dilakukan secara langsung atau tatap muka dan juga menggunakan media telekonferensi dengan Pemerintah Kabupaten Demak. Hal tersebut dimaksudkan agar pemerintah Kabupaten Demak dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan MUSRENBANG tersebut. Tujuan lainnya adalah agar usulan-usulan yang diberikan ditingkat kecamatan dapat didengar dan diselaraskan dengan arah pembangunan Kabupaten Demak. BPP Kecamatan Bonang yang merupakan komponen penting dalam pengembangan sektor pertanian di Kecamatan Bonang juga ikut andil dalam memberikan usulan dalam MUSRENBANG Kecamatan Bonang. Usulan yang diberikan BPP Kecamatan

Bonang saat MUSRENBANG Kecamatan Bonang tahun 2020 dapat dilihat pada Ilustrasi 6 berikut.

**DAFTAR USULAN MUSRENBANG RKPd TAHUN ANGGARAN 2021**  
**INSTANSI/UPTD/UPTB : PERTANIAN KECAMATAN BONANG**

No.	Uraian Kegiatan	Urutan Prioritas	Vol.	Satuan	Dana (Rp.1000,-)	Sumber dana	Hasil	Lokasi	SKPD Penanggung jawab
1.	Diklat Teknologi Pertanian Terapan bagi Petani	I	18	Unit	180.000	Dana Desa	Peningkatan pengetahuan peseta (petani)	Seluruh desa pertanian (Sumberejo, Sukodono, Kembangan, Karangrejo,	Kontrolasi dan Gaspartan Desa masing-masing
2.	Demplot (percontohan) Pertanian terpadu	II	18	Unit	180.000	Dana Desa	Peningkatan keterampilan peseta (petani)	Gebang, Gebangarum, Tiogoboyo, Krajanbogo, Jatimulyo, Tridonorejo,	
3.	Studi banding bidang Pertanian di Wilayah Demak/Jawa Tengah	III	18	Unit	180.000	Dana Desa	Peningkatan wawasan dan motivasi peseta (petani)	Betahwalang, Serangan, Jatirogo, Bonangrejo, Poncoharjo, Wonowari, Jali, Weding)	
4.	Pembangunan Gubug Pertemuan di Lokasi persawahan	IV	18	Unit	180.000	Dana Desa	Peningkatan aktivitas dan intensitas Penyuluhan Pertanian		
<b>JUMLAH</b>							720.000		

Demak, 25 Januari 2020  
P3K/Kord. PPL BPP Bonang

**M. HISAM, SP.**  
Nip. 19631215 198603 1 016

Ilustrasi 6. Daftar Usulan BPP Kecamatan Bonang dalam MUSRENBANG Kecamatan Bonang 2020.

Berdasarkan usulan MUSRENBANG tersebut dapat dijelaskan bahwa BPP Kecamatan Bonang berupaya meningkatkan pembangunan pertanian melalui peningkatan pengetahuan, tersedianya sarana prasarana dan pengembangan sumberdaya petani sehingga dapat meningkatkan keterampilan petani dalam usahatani. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sudalmi (2010) yang menyatakan bahwa pembangunan pertanian menunjukkan adanya usaha untuk meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan pendapatan, produktivitas usaha petani dengan upaya penambahan jumlah modal dan *skill*, serta memberikan

ruang campur tangan manusia dalam perkembangan hewan dan tumbuhan yang diusahakannya.

Pembangunan pertanian yang diharapkan oleh penyuluh adalah pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan sendiri merupakan pembangunan pertanian yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, kenaikan keuntungan usahatani serta optimalisasi sumberdaya pertanian tetapi juga pada peningkatan kesadaran pelaku usahatani dalam aspek ekologi serta kelestarian sumberdaya alam. Upaya yang dilakukan oleh BPP Kecamatan Bonang dalam pembangunan pertanian berkelanjutan diusulkan melalui pengadaan demonstrasi plot (demplot) dan diklat (pendidikan dan pelatihan) tentang teknologi pertanian terapan. Menurut keterangan koordinator penyuluh BPP Kecamatan Bonang tentang kurangnya lahan percobaan pengembangan pertanian atau demplot menjadikan petani belum bisa belajar percontohan pertanian yang disarankan oleh penyuluh sehingga proses pembelajaran secara langsung dengan mengamati kurang bisa terlaksana.

Upaya BPP Kecamatan Bonang mendukung adanya usulan pengadaan demplot tersebut adalah dengan diusulkannya program diklat pertanian terapan agar secara luas pertanian di Kecamatan Bonang dapat memberi dampak bagi sektor yang lain. Rangkuti (2012) menjelaskan bahwa pembangunan pertanian modern adalah langkah strategis pembangunan pertanian berkelanjutan sebagai paradigma baru yang akan mendorong daya beli masyarakat pedesaan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan sektor non pertanian. Hal yang senada juga disampaikan oleh Haris *et. al* (2017) yang menyatakan bahwa luaran sektor

pertanian dapat berkontribusi dalam penyediaan bahan pangan, penyedia bahan pakan, penyedia bahan baku industri, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga pedesaan serta penyumbang dalam Produk Domestik Bruto (PDB).

Adanya usulan gubug pertanian dalam MUSRENBANG Kecamatan Bonang juga berupaya meningkatkan daya serap aspirasi yang didapatkan dari petani. Hasil yang diharapkan dari usulan ini adalah menjadikan kebijakan pembangunan pertanian dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kemauan petani sehingga petani tidak hanya dijadikan objek pembangunan tetapi juga subjek atau pelaku pembangunan. Usulan-usulan BPP Kecamatan Bonang dalam MUSRENBANG Kecamatan Bonang tersebut dapat mengarahkan pembangunan pertanian di Kecamatan Bonang kepada pembangunan yang memahami kondisi dan potensi wilayah, optimalisasi sumberdaya manusia serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam berusahatani. Arah kebijakan pembangunan pertanian tersebut secara kolektif diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan produktifitas pertanian yang ada di Kecamatan Bonang.

#### **4.1.1. Kondisi Geografis**

Wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Bonang adalah seluruh wilayah yang termasuk kedalam wilayah administratif Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Kabupaten Demak sendiri terletak pada koordinat  $6^{\circ}43'26'' - 7^{\circ}09'43''$  Lintang Selatan dan  $110^{\circ}27'58'' - 110^{\circ}48'47''$  Bujur Timur. Berdasarkan informasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak melalui publikasi

Kecamatan Bonang dalam Angka 2019 dijelaskan bahwa Kecamatan Bonang memiliki batas-batas wilayah administratif yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Wedung, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Demak, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Karangtengah, serta dibagian barat berbatasan dengan Laut Jawa.

Wilayah Kecamatan Bonang sendiri merupakan bagian dari Kabupaten Demak. Wilayah ini tidak memiliki perbedaan dalam kondisi iklim dengan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Demak. Hal tersebut terjadi dikarenakan curah hujan yang ada di wilayah Kecamatan Bonang. Menurut data BPS Kabupaten Demak (2019) menyebutkan bahwa curah hujan di wilayah Kecamatan Bonang dapat dibagi menjadi 3 kondisi yaitu bulan basah, bulan lembab dan bulan kering. Bulan basah yang memiliki curah hujan diatas 100 mm jatuh pada bulan Januari, Februari, Maret, April. Sementara itu bulan lembab atau bulan dimana curah hujan antara 60-100 mm terjadi pada bulan Mei dan September. Bulan kering atau bulan yang curah hujannya kurang dari 60 mm jatuh pada bulan Juni, Juli, Agustus. Perbedaan curah hujan tersebut berpengaruh pada adanya dua musim di Kecamatan Bonang yaitu musim kemarau dan penghujan. Bulan Juni sampai dengan September di Kecamatan Bonang terjadi musim kemarau. Bulan Desember sampai dengan Maret adalah waktu musim penghujan di Kecamatan Bonang. Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April – Mei dan Oktober – November.

Wilayah Kecamatan Bonang memiliki wilayah yang terdiri dari wilayah daratan dengan ketinggian 3-4 meter diatas permukaan laut dan wilayah

perairan/laut dengan ketinggian 0-4 meter diatas permukaan laut. Tanah wilayah Kecamatan Bonang memiliki jenis tanah Gromosol Kelabu dengan struktur tanah liat, hal tersebut mengakibatkan pada musim kemarau maka permukaan tanah akan berada dalam keadaan pecah-pecah. Wilayah Kecamatan Bonang pada musim kemarau memiliki suhu sekitar 27-31 °C dan pada musim penghujan memiliki suhu sekitar 22-26 °C. Wilayah Kecamatan Bonang memiliki sumber perairan dari tadah hujan dan juga berasal dari Sungai Tuntang didaerah selatan dan Waduk Kedungombo (sungai jajar) didaerah utara.

#### **4.1.2. Potensi Sumberdaya**

Wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Bonang memiliki sumberdaya pertanian dan perikanan. Potensi perikanan dapat dilihat dari budidaya perikanan air tawar maupun air payau dan perikanan tangkap (lepas pantai). Ada 3 desa yang berdasarkan potensi wilayah telah menjadi fokus pengembangan dinas yang mengurus tentang perikanan dan kelautan sehingga tidak termasuk kedalam wilayah administratif pengembangan pertanian oleh BPP Kecamatan Bonang. Potensi perikanan selain pada potensi laut juga dapat dilihat dari pengembangan usaha perikanan air tawar yang dikelola oleh masyarakat.

Potensi perikanan di Kecamatan Bonang menjadikan petani yang memiliki kecukupan lahan akan mengkombinasikan antara lahan pertanian dengan perikanan. Praktik kombinasi tersebut seperti perpaduan budidaya lele yang dikombinasikan dengan budidaya tanaman jambu disekelilingnya, selain itu juga lahan sawah yang mulai dikembangkan dengan pola minapadi. Beberapa desa di

Kecamatan Bonang yang memiliki potensi besar di perikanan yaitu Desa Margolinduk, Desa Morodemak dan Desa Purworejo. Beberapa desa tersebut tidak termasuk dalam wilayah administratif pengembangan sektor pertanian karena tidak terdapat lahan pertanian di wilayah tersebut. Sektor lain yang potensial di Kecamatan Bonang adalah sektor pertanian.

Adanya potensi lahan pertanian di wilayah Kecamatan Bonang menjadikan sektor pertanian sebagai sumber lapangan kerja masyarakat. Mayoritas wilayah pengembangan pertanian di Kecamatan Bonang adalah wilayah pengembangan tanaman pangan dan hortikultura. Pembangunan pertanian di Kecamatan Bonang juga didukung adanya upaya penyediaan sumberdaya penunjang yang dimaksimalkan untuk optimalisasi lahan pertanian khususnya subsektor tanaman pangan dan hortikultura. Sumberdaya penunjang seperti ketersediaan jalan usahatani (JUT), normalisasi saluran irigasi, program pemberdayaan dan lain-lain. Petani yang memiliki kecukupan lahan akan menggunakan lahannya untuk mengkombinasikan penanaman beberapa tanaman pangan dan hortikultura.

Tanaman pangan yang utama dibudidayakan oleh petani adalah padi. Hal tersebut sesuai pendapat Rohadi (2014) yang menyatakan bahwa pembangunan tata ruang daerah disesuaikan dengan pengembangan daerah berbasis produktivitas daerah seperti hasil pertanian yang dapat dikembangkan menjadi kota sentra pertanian atau agropolitan. Varietas padi yang secara umum dikembangkan oleh petani adalah varietas Ciherang atau IR-6. Walaupun demikian, tiap desa di Kecamatan Bonang memiliki kecenderungan varietas padi

yang berbeda sesuai kondisi tanah di wilayah tersebut. Berikut adalah potensi sumberdaya yang dilihat dari ketersediaan lahan pertanian di Kecamatan Bonang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Penggunaan Lahan di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang Tahun 2018

Desa	Luas Wilayah Per Desa		Penggunaan Lahan		
	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)	Tanah Sawah (ha)	Tanah Kering (ha)	Jumlah (ha)
Morodemak	4,26	5,12	0	426,3	426,3
Margolinduk	0,95	1,14	0	95,17	95,17
Gebang	3,31	3,98	168,33	53,37	331,26
Gebangarum	2,95	3,55	173,93	64,35	221,7
Karangrejo	5,07	6,10	403,15	71,53	238,28
Tlogoboyo	3,67	4,41	274	94,7	368,7
Krajanbogo	2,76	3,32	228,56	54,56	283,12
Kembangan	2,14	2,57	177,04	40,55	217,59
Sumberejo	5,19	6,24	497,39	62,43	238,28
Sukodono	2,49	2,99	234,65	20,76	255,41
Jatimulyo	2,69	3,24	193,37	54,91	248,28
Bonangrejo	3,47	4,17	278,03	67,43	345,46
Jatirogo	3,23	3,88	262,17	53,26	315,43
Tridonorejo	5,33	6,41	276,41	101,32	377,73
Purworejo	7,41	8,91	0	741,48	741,48
Betahwalang	4,69	5,63	76,44	238,87	315,31
Serangan	3,07	3,69	238,52	28,65	267,17
Poncoharjo	6,94	8,34	510,35	180,07	694,07
Wonosari	3,93	4,72	269,73	76	347,73
Jali	3,54	4,25	310	43,89	353,89
Weding	6,13	7,36	529	83,65	612,65
<b>Jumlah 2019</b>	<b>83,24</b>	<b>100</b>	<b>5670,31</b>	<b>2653,25</b>	<b>8323,56</b>

Sumber: BPP Kecamatan Bonang, 2019

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 5670,31 ha wilayah di Kecamatan Bonang merupakan wilayah pengembangan pertanian lahan sawah dan sebanyak 2653,25 ha wilayah di Kecamatan Bonang dimanfaatkan sebagai lahan kering. Pemanfaatan lahan kering digunakan untuk perumahan, jalan dan pemanfaatan lahan yang lainnya. Lahan sawah di Kecamatan Bonang memiliki beberapa perubahan fisik pada kondisi tertentu. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis setempat.

Kondisi tanah sawah yang pada kondisi tertentu memiliki kadar garam tinggi dan kurang mendukung untuk melakukan usahatani komoditas pertanian akan beralih fungsi menjadi lahan tambak. Sementara itu, jika kondisi tanah mendukung untuk pertanian maka lahan tersebut akan difungsikan kembali menjadi lahan sawah untuk usahatani. Daerah yang berada di sepanjang jalur perantara antara air tawar dan air laut memiliki kondisi air payau yang dapat berdampak pada kualitas pengairan dan kondisi struktur tanah di wilayah tersebut. Hal tersebut terjadi di beberapa wilayah seperti di sebagian wilayah Desa Betahwalang, Desa Gebangarum, Desa Gebang, Desa Karangrejo. Masyarakat setempat menyebut kondisi tersebut dengan istilah “sawah asin”. Berdasarkan informasi dari informan penelitian, apabila kondisi tanah dianggap petani sudah cukup potensial untuk berusahatani atau tidak banyak mengandung garam maka masyarakat di wilayah tersebut akan menggunakan lahannya kembali untuk persawahan.

Kecamatan Bonang yang memiliki luasan lahan pertanian yang mendominasi wilayah tersebut menjadikan dinamika sosial yang terjadi di

masyarakat tidak jauh dengan dunia pertanian. Apabila melihat sumberdaya manusia yang ada di Kecamatan Bonang maka penduduk di wilayah Kecamatan Bonang sebagian besar merupakan pelaku utama usahatani karena bermata pencaharian sebagai petani. Lahan sawah yang dimiliki petani memiliki luasan yang berbeda-beda hal tersebut juga yang menjadikan adanya berbagai karakteristik petani di Kecamatan Bonang. Petani yang mendapatkan sawah dari sistem warisan atau memiliki lahan luas tetapi tidak memiliki ketertarikan dan keterampilan berusahatani maka akan menyewakan lahan yang dimiliki kepada orang lain.

Anggapan bahwa lahan yang dimiliki akan tidak efisien jika dikelola sendiri sedangkan keterampilannya kurang, masih melekat pada pemilik lahan. Pemilik lahan yang tidak memiliki keterampilan berusahatani atau memiliki kesibukan diluar sektor pertanian maka lebih memilih untuk menyewakan lahannya kepada penggarap. Masyarakat tidak hanya melakukan usahatani pada lahan sawah tetapi juga pada lahan kering yang dimiliki. Pemanfaatan lahan kering lebih lanjut digunakan selain dari perumahan dan jalan juga digunakan untuk ladang, kebun, dan lahan pekarangan. Hal Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan prospek pengembangan yang potensial seperti halnya program KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari).

Potensi lahan sawah di Kecamatan Bonang juga didukung dengan pembangunan infrastruktur pendukung pertanian misalnya adanya pembangunan Jalan Usahatani (JUT). Program JUT ini secara bertahap mulai dituntaskan oleh pemerintahan desa maupun pemangku kebijakan yang lain. Hal tersebut

merupakan bentuk dukungan pemerintah desa dan swadaya masyarakat bahwa untuk menunjang pembangunan pertanian dibutuhkan kontribusi dari semua pihak, selain dari pengembangan budidaya tetapi juga pembangunan infrastruktur pendukung. Dukungan pemerintah desa dalam pembangunan pertanian pada bidang infrastruktur juga diimbangi dengan normalisasi sungai dan saluran irigasi. Adanya JUT diharapkan dapat memperlancar arus mobilisasi pertanian baik dalam penyediaan kebutuhan sarana produksi pertanian tetapi juga pengangkutan hasil pertanian sehingga lebih mudah dan lebih mengarah pada efisiensi usahatani.

#### **4.1.3. Tingkat Produksi**

Lahan pertanian di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bonang secara umum merupakan pengembangan pertanian tanaman pangan khususnya padi. Belum ada spesifikasi pengembangan komoditas tertentu untuk suatu luasan lahan dalam satu wilayah desa. Sehingga menjadikan belum ada sektoralisasi pengembangan komoditas pertanian di Kecamatan Bonang. Kondisi tersebut dipahami oleh pemerintah desa dan penyuluh sebagai usaha optimalisasi lahan pertanian tanaman pangan. Ada beberapa komoditas tanaman pangan yang dikembangkan di Kecamatan Bonang seperti padi, ketela pohon, ketela rambat dan beberapa jenis palawija seperti kacang hijau. Walaupun demikian petani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang juga menanam beberapa jenis hortikultura melalui mekanisme sistem tanam.

Petani dalam proses usahatannya memanfaatkan lahan tegalan atau pematang sawah sebagai lahan untuk beberapa jenis sayuran seperti kacang

panjang, kangkung, sawi, mentimun dan sebagainya. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Demak (2019) menunjukkan bahwa pada tahun 2018 Kecamatan Bonang mampu mencapai produksi bersih komoditas padi sebanyak 94.561 ton, sedangkan komoditas kacang hijau produksi bersihnya sebanyak 3.264 ton. Meskipun memiliki kondisi geografis yang relatif sama, tetapi tiap desa memiliki kecenderungan penanaman yang berbeda-beda.

Perbedaan pola tanam yang diterapkan oleh petani di satu desa dengan desa lainnya menjadikan produksi pertanian dapat beraneka ragam. Keragaman komoditas pertanian yang dibudidaya oleh petani diharapkan tidak menjadikan harga komoditas tersebut tidak rendah pada saat panen secara bersamaan. Meskipun memiliki pengembangan komoditas yang berbeda-beda, pada kenyataannya mekanisme pasar menjadikan harga komoditas pertanian rendah atau murah terutama ketika stok tersedia banyak pada saat pasca panen. Penyuluh sebagai pendamping petani memberikan anjuran agar petani tidak menerapkan menanam satu jenis komoditas pertanian sepanjang tahun agar pemanfaatan lahan dapat maksimal dan dapat meningkatkan pendapatan petani.

Penyuluh BPP Kecamatan Bonang merupakan komponen regulator dan fasilitator yang menjadi tangan panjang dalam penyampaian program pengembangan pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani oleh pemerintah. Penyuluh berupaya agar petani secara bertahap tumbuh kesadaran untuk tidak hanya menerapkan sistem tanam monokultur atau hanya berfokus pada satu jenis komoditas. Penyuluh juga memberikan dorongan agar petani juga mengembangkan sistem tumpangsari atau sistem surjan. Hal tersebut dilakukan

agar mengurangi dampak negatif pada satu luasan lahan petani karena hanya menanam satu jenis tanaman. Keragaman komoditas dalam satu luasan lahan dimaksudkan juga agar dapat meningkatkan pendapatan petani. Walaupun demikian, komoditas padi dan kacang hijau adalah komoditas yang mendominasi pengembangan produksi pertanian di Kecamatan Bonang.

#### **4.2. Kebiasaan Bertani Petani**

Suatu program pemerintah dapat terlaksana jika didukung dengan kondisi sosial budaya yang sejalan dengan tujuan kebijakan pembangunan. Budaya masyarakat agraris yang tumbuh didalam masyarakat di Kecamatan Bonang merupakan kombinasi dari nilai spiritual, kearifan sosial dan budaya bertani yang ada. Masyarakat Kecamatan Bonang yang kental akan budaya masyarakat agraris menjadikan dinamika sosial yang terbentuk juga hasil dari pemaknaan agraris dimata masyarakat. Salah satu program yang pada pelaksanaannya mendapat pengaruh sosial budaya bertani oleh petani di Kecamatan Bonang adalah program kartu tani.

Petani yang ada di Kecamatan Bonang secara umum merupakan petani dengan usia rata-rata antara diatas 35 tahun dan merupakan petani yang melakukan usahatani secara turun temurun. Kondisi tersebut menjadikan sebagian petani belum memaksimalkan teknologi informasi serta teknologi pertanian yang berkembang. Walaupun seperti itu, koordinasi sebagian petani dengan penyuluh sudah mulai menggunakan teknologi internet untuk media sosial sehingga komunikasi dapat dilakukan secara daring. Badri (2016) menyampaikan bahwa

adanya inisiatif dalam membangun desa berbasis internet menjadikan desa tidak mengalami kesenjangan dalam pembangunan dan akses terhadap informasi. Kondisi sosial budaya petani di Kecamatan Bonang kaitannya dengan sistem budidaya dapat dilihat dari aktivitas usahatani yang dilakukan oleh petani.

Petani di wilayah Kecamatan Bonang memiliki kecenderungan mengelola lahan pertanian yang merupakan lahan warisan dan selain dari sistem itu banyak pula yang menggunakan sistem sewa. Sistem tersebut menjadikan lahan pertanian menjadi salah satu aset yang banyak diambil manfaatnya dan bersifat turun-temurun. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa petani di Kecamatan Bonang melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan aktivitas usahatannya agar didapatkan hasil pertanian yang banyak. Pandangan petani tersebut dimaksudkan agar petani segera mendapatkan keuntungan untuk membayar harga sewa lahan dan mendapatkan sisa keuntungan serta modal untuk usahatani periode selanjutnya. Latar belakang tersebut dapat berpengaruh pada kebiasaan bertani petani. Kebiasaan-kebiasaan bertani yang merupakan akibat sistem bertani yang tidak mandiri seperti adanya ketergantungan pada bahan kimia hasil pabrikasi.

Petani di Kecamatan Bonang secara umum menerapkan pola tanam yaitu padi-padi-palawija dan padi-padi-bera. Komoditas padi dipilih karena cocok dengan ketersediaan air pada masa tanam (MT) I maupun masa tanam (MT) II. Kondisi lahan pasca MT II yang memiliki karakteristik lembab dimanfaatkan untuk menanam palawija seperti kacang hijau. Lahan yang memiliki kondisi tanah asin maka MT III tidak ditanami komoditas apapun atau disebut bera. Lahan pertanian di Kecamatan Bonang secara umum termasuk lahan tadah hujan.

Ketersediaan air dan mekanisme pengairan berpengaruh pada kebiasaan pemupukan yang dilakukan petani. Kondisi lahan yang memiliki sistem pengairan yang lancar dan sesuai maka petani akan melakukan pemupukan pada waktu tersebut.

Berbeda halnya dengan kondisi pengairan yang sulit atau jumlah air sedikit maka petani akan mengairi lahan sawah yang berasal dari sumber-sumber air disekitarnya. Beberapa lahan yang termasuk lahan cekung atau kondisi ketersediaan air berlimpah sebab curah hujan tinggi maka petani melakukan penyedotan air dan menunda proses pemupukan. Penyedotan air menggunakan mesin pompa air atau menggunakan sistem tradisional. Kebiasaan tersebut akan berubah menjadi posisi yang dilematis bagi petani apabila kondisi air berlimpah tetapi tanaman sudah memasuki akhir masa pemupukan. Kondisi tersebut akan mendorong petani mengambil keputusan untuk tetap melakukan pemupukan karena dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif jika pemupukan terlambat dilakukan pada kondisi tersebut.

Kebiasaan bertani petani di Kecamatan Bonang belum tertarik dengan model pemberian pupuk organik cair dan masih bergantung dengan penggunaan produk pabrikasi. Penyuluh mendorong kelompok tani untuk meminimalisir penggunaan pupuk kimia pabrikasi yang selama ini banyak digunakan oleh petani dengan dosis yang sesuai keinginan petani. Ketidaktertarikan petani terhadap pupuk organik terlihat dengan rendahnya partisipasi petani saat adanya penyuluhan pembuatan pupuk organik cair yang diadakan oleh penyuluh. Berdasarkan pengamatan penggunaan ZPT (Zat Pengatur Tumbuh) dan PPC

(Pupuk Pelengkap Cair) sudah mulai digunakan oleh sebagian petani walaupun belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan harga ZPT/PPC mahal bagi petani sedangkan kemampuan petani dalam membeli berbeda-beda. Petani mendapatkan pengetahuan terkait obat atau ZPT/PPC biasanya dari sosialisasi dari perusahaan swasta. Perusahaan swasta penjual obat-obatan pertanian melakukan izin dan promosi pada PPL atau langsung berkoordinasi dengan pengecer pupuk disuatu wilayah desa dan dapat ditindaklanjuti dengan sosialisasi produk yang ditawarkan langsung kepada petani.

Kebiasaan bertani petani di Kecamatan Bonang secara umum akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan pertanian yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebiasaan bertani dalam hal penggunaan bibit, pengaturan penanaman berdasarkan pola tanam, pengaturan ketersediaan air untuk lahan, kebiasaan pemupukan, kecenderungan terhadap penggunaan produk pabrikasi serta kebiasaan bertani yang lain akan berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan pertanian. Kebijakan pertanian yang mendapat pengaruh dari kebiasaan bertani petani dalam hal pemupukan adalah kebijakan kartu tani.

Kebijakan kartu tani yang memiliki tujuan 6 tepat dalam pendistribusian pupuk subsidi pada kenyataannya dilapangan dibenturkan dengan kebiasaan pemupukan oleh petani. Misalnya dalam tujuan kartu tani yaitu tepat jumlah, tetapi pada kenyataannya pemupukan yang dilakukan petani sering lebih dari alokasi yang diusulkan. Alasan kelebihan penggunaan pupuk subsidi dikarenakan kegagalan atau tidak maksimalnya pemupukan yang dilakukan akibat kondisi air yang tinggi saat pemupukan, tanaman yang mati sehingga diperlukan

penyulaman, ataupun penyebab lainnya. Kebiasaan bertani oleh petani di Kecamatan Bonang dapat berpengaruh pada implementasi program kartu tani sehingga tujuan 6 tepat belum terlaksana dengan optimal.

Ketepatan tersebut tidak hanya pada penyediaan tetapi juga terkait pelaksanaan pendistribusian dan penggunaan pupuk subsidi tersebut. Kebijakan kartu tani secara substansial akan membangun kemandirian petani dalam usahatani. Kemandirian dan integrasi data petani akan memudahkan arus pembangunan pertanian baik tingkat pusat maupun tingkat desa. Kaitannya dengan pembangunan pertanian di desa maka tidak lepas campur tangan dari pemerintah pusat, daerah bahkan desa. Dukungan dari pihak birokrasi tentunya harus disesuaikan dengan kondisi kelompok sasaran yaitu petani termasuk didalamnya praktik-pratik kebiasaan bertani yang dilakukan. Kebiasaan bertani khususnya yang berkaitan dengan pemupukan akan memberikan kedinamisan dalam pelaksanaan program kartu tani tersebut.

#### **4.3. Karakteristik Informan Penelitian**

Karakteristik informan berkaitan dengan kondisi dari informan pelaksana kebijakan kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Informan dalam penelitian ini terdiri dari unsur penyuluh, ketua kelompok tani, KPL, pihak BRI dan kepala desa. Informan tersebut adalah komponen-komponen pelaksana kebijakan dalam program kartu tani. Komponen-komponen yang berperan sebagai pelaksana kebijakan di Kecamatan Bonang melakukan koordinasi-koordinasi dalam menunjang

pembangunan pertanian. Ketua kelompok tani sebagai pelaksana kebijakan juga merupakan kelompok sasaran karena posisinya sebagai petani. Karakteristik ketua kelompok tani dalam usahatani secara umum sama dengan petani sebagai anggota kelompok tani.

Adanya kelompok tani dimanfaatkan oleh petani di Kecamatan Bonang untuk lebih mudah dalam mengakses informasi maupun program-program pertanian yang diberikan oleh pemerintah. Selain membentuk kelompok tani sebagai wadah koordinasi lingkup kecil, maka di tiap desa juga dibentuk gapoktan sebagai tempat koordinasi yang memiliki cakupan lebih luas. Adanya kelompok-kelompok tersebut untuk mengakomodir aspirasi petani sehingga petani secara mandiri dapat mengupayakan langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kesejahteraan tersebut baik dalam aspek produksi usahatani maupun peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Kelompok tani di wilayah Kecamatan Bonang dibentuk berdasarkan blok luasan lahan sawah di masing-masing desa.

Adanya sistem tersebut memungkinkan adanya kasus bahwa pemilik lahan yang ada di kompleks suatu blok sawah bukan merupakan warga dusun atau desa tersebut. Hal tersebut menjadikan anggota kelompok tani terkadang juga berasal dari luar desa setempat. Setiap desa memiliki satu gapoktan dengan jumlah anggota/petani dalam setiap kelompok taninya rata-rata adalah  $\pm 50$  orang atau disesuaikan dengan pemilik lahan pada luasan blok lahan yang ada. Apabila jumlah anggota kelompok tani terlalu besar yaitu sekitar lebih dari 100 petani dalam satu kelompok maka kelompok tersebut akan dipecah menjadi lebih kecil

misalnya pemecahan kelompok tani yang terjadi di Desa Poncoharjo, Desa Weding dan Desa Tlogoboyo.

Adanya kasus pemilik lahan pertanian yang berada pada satu blok luasan lahan tetapi memiliki tempat tinggal diluar dusun/desa menjadikan iklim pertemuan kelompok tani tidak dapat maksimal. Artinya kelompok tani dalam melakukan pertemuan kelompok tidak memiliki jadwal yang tetap dan hanya sesuai kebutuhan kelompok tani. Pertemuan kelompok tani misalnya pada saat awal masa tanam, masa pemupukan, masa pengairan/irigasi ataupun pertemuan yang membahas masalah-masalah yang dampaknya menyangkut hajat anggota kelompok. Fungsi kelompok tani yang sebenarnya wahana belajar, tempat kerjasama dan unit produksi belum dimaksimalkan dengan baik oleh petani. Kelompok tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang cenderung bersifat pasif.

Anggota kelompok tani cenderung hanya bertindak ketika seorang ketua kelompok tani memberikan informasi atau arahan, sehingga kurang optimalnya fungsi wahana belajar di dalam kelompok tani. Hal tersebut dapat terjadi karena kepercayaan kepada ketua kelompok tani telah terbentuk dengan erat. Kepercayaan tersebut muncul setelah melihat kinerja ketua kelompok tani dalam menjalankan tugasnya. Selain itu kondisi kelompok tani yang kurang dinamis disebabkan kurangnya ketertarikan anggota kelompok tani untuk menjadi pengurus atau ketua kelompok tani. Keadaan ini yang membuat perkembangan kelompok tani cenderung stagnan atau tetap. Seorang ketua kelompok tani di Desa Gebang, Kecamatan Bonang menyebutkan bahwa menjadi posisi ketua kelompok

tani adalah tanggungjawab sosial. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan beliau:

*“Dadi ketua kelompok tani iku pekerjaan sosial, ora ono sing nggaji, ono ne mung omongan tok soko anggota”*

“Jadi ketua kelompok tani itu pekerjaan sosial, tidak ada yang memberi gaji, adanya hanya omongan (kritikan) dari anggota”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diambil informasi bahwa kurang aktifnya regenerasi dalam kepengurusan kelompok tani. Misalnya kurangnya minat untuk menjadi ketua kelompok tani dikarenakan dianggap tidak dapat diambil manfaat keuntungan ekonomisnya. Menjadi pengurus kelompok tani merupakan tanggungjawab sosial dan atas kesadaran serta kebutuhan bersama. Selain melihat karakteristik kelompok tani maka untuk memperjelas karakteristik informan ketua kelompok tani dapat dijelaskan karakteristik kelembagaan petani.

Kelembagaan petani di Kecamatan Bonang bersifat stagnan dengan dominasi ketua kelompok tani sebagai sentris dalam manajemen kelompok tani. Kurangnya kemampuan kelompok tani untuk berkembang dilatarbelakangi oleh usia pengurus kelompok tani yang sudah tua, tingkat pendidikan rendah, masih memegang orientasi keuntungan nominal belum mempertimbangkan keuntungan sosial. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tujuan pembentukan kelompok tani masih dikarenakan respon terhadap adanya program atau bantuan pemerintah dan lain-lain. Ketua kelompok tani dalam menjalankan perannya sebagai pelaksana program kartu tani secara linier berkoordinasi dengan penyuluh lapangan.

Komponen kedua yang memiliki peran besar dalam optimalisasi program kartu tani di Kecamatan Bonang adalah penyuluh. Penyuluh di Kecamatan Bonang dibagi menjadi dua yaitu penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan penyuluh swadaya. Penyuluh pertanian lapangan merupakan pegawai pemerintah daerah yang dibawah koordinasi dinas yang menangani pertanian di Kabupaten Demak. Penyuluh pertanian lapangan kemudian terbagi lagi menjadi dua status yaitu penyuluh pertanian lapangan pegawai negeri sipil (PPL PNS) dan penyuluh pertanian lapangan yang berstatus sebagai tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THL-TBPP). Walaupun ada perbedaan status tetapi keduanya memiliki tugas dan peran yang sama dalam melaksanakan penyuluhan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa setiap penyuluh di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang memiliki wilayah binaan sekitar 2 sampai 3 desa. Wilayah binaan tersebut yang menjadi wilayah kerja tiap penyuluh secara individu. Berdasarkan manajemen penyuluhan maka seluruh penyuluh di BPP Kecamatan Bonang bekerja dalam satu manajemen dan saling terkoordinir. Setiap penyuluh memiliki luas wilayah binaan yang berbeda-beda. Luas wilayah tiap penyuluh juga berpengaruh dengan akses mobilisasi dan intensitas kunjungan lapangan. Penyuluh pertanian lapangan dalam melakukan tugasnya difasilitasi dalam sebuah balai penyuluhan pertanian (BPP).

Tatanan struktural BPP Kecamatan Bonang selain terdiri dari penyuluh lapangan terdapat juga satu komponen yang berperan dalam BPP yaitu pegawai yang menangani penanggulangan organisme pengganggu tanaman (POPT). Pelaksanaan kegiatan penyuluhan sendiri memfokuskan PPL yang menjalankan

tugas tersebut sedangkan POPT hanya berfokus pada penanggulangan organisme pengganggu tanaman. Penyuluh BPP Kecamatan Bonang dalam kebijakan program kartu tani juga ada yang merangkap sebagai admin kartu tani dan petugas verifikasi dan validasi (verval). Dua posisi tersebut yang melakukan koordinasi dengan pelaku penunjang/mitra dalam pendistribusian pupuk subsidi yaitu KPL dan BRI. .

Kios Pupuk Lengkap (KPL) merupakan komponen ketiga dalam sistem penyaluran pupuk subsidi. KPL merupakan tangan panjang dari distributor pupuk subsidi tingkat kabupaten agar pupuk subsidi dapat di akses oleh petani di tingkat kecamatan bahkan desa. KPL di Kecamatan Bonang memiliki karakteristik yang hampir sama karena diatur dalam suatu mekanisme pendistribusian pupuk subsidi secara resmi. KPL tersebut adalah KPL resmi yang sudah mendaftarkan diri sebagai penyalur pupuk subsidi di Kabupaten Demak dan tercatat di BPP Kecamatan Bonang. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sriwinarti dan Faesal (2016) yang menyatakan bahwa kios binaan atau pengecer merupakan pengecer pupuk resmi yang mendapatkan surat dari produsen untuk penyaluran pupuk bersubsidi sesuai aturan yang telah ditetapkan.

KPL resmi diwajibkan mencirikan kiosnya dengan cat dominasi warna biru muda dengan bertuliskan P-Mart dan dilengkapi dengan atribut HET pupuk subsidi dan atribut-atribut lain yang berasal dari distributor. Jumlah KPL di Kecamatan Bonang ada sekitar 30 KPL yang memiliki wilayah tersebar di seluruh desa dalam wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang. KPL di Kecamatan Bonang kemudian bergabung dalam suatu paguyuban untuk memudahkan koordinasi antar

KPL. KPL merupakan lini ke IV dalam mekanisme penyaluran pupuk subsidi. Mekanisme program kartu tani mengatur bahwa KPL selain sebagai penyalur pupuk subsidi juga berperan sebagai agen BRILink karena dibekali alat EDC dari BRI.

BRI merupakan komponen keempat dari pelaksanaan kartu tani. BRI yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang terdiri dari 2 kantor KCP BRI unit. Kantor KCP BRI unit yang pertama adalah KCP BRI unit Wedung yang berlokasi di Jl. Setinggil Wedung atau kompleks pasar Wedung, Kecamatan Wedung yang juga melayani petani di wilayah Kecamatan Wedung. Kantor KCP BRI unit yang kedua adalah KCP BRI Unit Demak Kota yang berada di Jl. Pemuda No. 110, Petengan Selatan, Bintoro, Kecamatan Demak yang juga melayani petani di Kecamatan Demak. Tugas BRI dalam pelaksanaan program kartu tani yaitu pada penerbitan kartu tani. Proses penerbitan tersebut meliputi pencetakan, pendistribusian dan aktivasi kartu tani.

Komponen-komponen tersebut merupakan pelaku pelaksanaan lapangan yang secara praktis. Komponen yang lain selain komponen kelompok tani, penyuluh, KPL dan BRI adalah kepala desa. Kepala desa juga bertanggungjawab dalam pelaksanaan program kartu tani di Kecamatan Bonang. Peran tersebut seperti mendorong pengumpulan berkas pengusulan kartu tani, menyediakan tempat sosialisasi kartu tani yang diadakan dilingkup desa, melakukan verifikasi data petani serta verifikasi RDKK tingkat desa. Secara umum kepala desa memiliki peran yang penting dalam penentuan arah kebijakan pembangunan di desa. Hal tersebut karena kepala desa memiliki peran dalam melakukan

koordinasi-koordinasi kepada pihak terkait dalam hal pembangunan pertanian di desa termasuk didalamnya kemudahan *input* faktor bagi kelancaran usahatani.

#### **4.4. Implementasi Program Kartu Tani di Kecamatan Bonang**

Kartu tani yang merupakan program pemerintah provinsi Jawa Tengah sebenarnya merupakan program yang sudah sejak 2015 diluncurkan. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak kemudian menindaklanjuti program tersebut melalui sosialisasi-sosialisasi secara berjenjang baik ditingkat pelaksana program kartu tani. Pelaksanaan koordinasi tersebut melibatkan penyuluh kepada ketua kelompok tani, selain itu juga berkoordinasi dengan pihak mitra yaitu pengecer atau pemilik kios pupuk lengkap, BRI, dan pemerintah desa. Selain itu juga sosialisasi kepada sasaran program yaitu petani. Pada tahun 2017 kartu tani diperkenalkan dalam suatu *launching* kartu tani. Sosialisasi terkait kartu tani dilingkup petani yang dilakukan secara bergiliran dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain.

Sosialisasi dilakukan atas tanggungjawab Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak dengan melakukan koordinasi pada Balai Penyuluhan Pertanian di tiap kecamatan. Sosialisasi pada tahun tersebut terus digencarkan hingga pada tingkat pencetakan kartu tani ditahun 2018. Selama kurun waktu 2 tahun sejak 2015 sampai 2017 tersebut sosialisasi kartu tani belum disampaikan kepada tingkat pelaksana bawah dan sasaran program secara berkelanjutan walaupun telah menjadi agenda Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak. Sejak tahun 2017 sosialisasi terfokus pada penyampaian konsep program kartu

tani yang dimunculkan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut. Selain itu sosialisasi tersebut juga dilakukan dengan pendataan RDKK secara lebih sistematis.

Sosialisasi Program Kartu Tani yang dilakukan di BPP Kecamatan Bonang dilakukan di aula pertemuan BPP Kecamatan Bonang dengan mengundang komponen berupa perwakilan kelompok tani atau gapoktan, pengecer, dan pihak BRI. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan sistem penganggaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak sehingga BPP Kecamatan Bonang hanya bertugas sebagai penyedia tempat sosialisasi kartu tani tersebut. Sosialisasi program Kartu Tani kemudian ditindak lanjuti dengan sosialisasi yang dilakukan oleh BPP Kecamatan Bonang sendiri. Sosialisasi kartu tani yang dilakukan oleh BPP Kecamatan Bonang dilakukan di aula pertemuan Kantor Pemerintahan Desa Bonangrejo. Tempat tersebut dipilih karena dianggap strategis yaitu memudahkan akses dari desa-desa yang ada di Kecamatan Bonang. Sosialisasi secara pribadi oleh penyuluh BPP Kecamatan Bonang juga dilakukan di beberapa desa di Kecamatan Bonang tetapi tidak secara khusus membahas program kartu tani melainkan diikutkan dengan sosialisasi agenda pertanian yang lain.

Selama proses sosialisasi program Kartu Tani yang dilakukan di Kecamatan Bonang tidak menggunakan media cetak berupa *leaflet* yang dapat diberikan oleh penyuluh kepada petani melainkan hanya dengan media penyampaian materi secara langsung dengan model ceramah. Media sosialisasi tersebut dipilih karena dianggap lebih efektif dibanding media cetak berupa

leaflet. Sosialisasi atau penyuluhan terkait program kartu tani semakin gencar dilakukan oleh penyuluh setelah adanya intruksi gubernur Provinsi Jawa Tengah tentang penggunaan Kartu Tani dalam penebusan pupuk bersubsidi di Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan program kartu tani di BPP Kecamatan Bonang meliputi proses pengusulan dan pembuatan RDKK, penerbitan kartu tani serta proses pengaplikasian kartu tani dan pembelian pupuk subsidi. Pelaksanaan program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### **4.4.1. Pengusulan Kartu Tani dan Pembuatan RDKK**

Proses awal dalam mekanisme program kartu tani adalah pengusulan petani yang akan mendapatkan kartu tani dan pengajuan alokasi pupuk yang dibutuhkan. Usulan kebutuhan pupuk tersebut yang kemudian akan *ter-input* dalam sistem kartu tani. Pendataan petani dan pengajuan alokasi pupuk bersubsidi dimasukkan dalam pembuatan RDKK. Pengajuan Kartu Tani diawali dari pembuatan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Pada proses pengajuan kartu tani, petani yang diajukan untuk kartu tani harus mengumpulkan fotokopi KTP dan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang). Pendataan petani yang diusulkan untuk mendapat kartu tani dilakukan oleh pengurus kelompok tani dengan pendampingan dari penyuluh.

Pengurus kelompok tani mendata dengan cara tulis tangan yaitu membuat daftar keanggotaan kelompok tani secara manual atau dengan cara diketik dalam bentuk *form* yang sudah diberikan penyuluh. Penyuluh dalam memudahkan

pendataan petani maka penyuluh membuat *form* sendiri yang disesuaikan dengan tingkat pengetahuan petani. Hal tersebut dimaksudkan agar petani tidak merasa kesulitan dengan *form* yang ada pada pedoman pembuatan RDKK. Isian *form* meliputi nama petani, NIK, komoditas yang diusahakan, luasan lahan, nama kelompok tani dan alamat. Penyuluh berkoordinasi dengan kelompok tani untuk pendataan semua petani yang ada walaupun lahannya lebih dari 2 ha. Hal tersebut tidak sesuai dengan aturan dalam kartu tani dimana yang berhak mendaftarkan atau diusulkan untuk kartu tani adalah yang memiliki lahan maksimal 2 ha.

Menurut informasi Biro Infrastruktur dan Sumberdaya Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa petani yang diusulkan dalam kartu tani adalah yang memiliki lahan maksimal 2 hektar. Batasan tersebut dimaksudkan agar subsidi pupuk dalam kartu tani tepat dimiliki oleh petani dengan luasan yang kecil dan tepat sasaran. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah subsidi pupuk dimaksudkan untuk memberikan akses kemudahan bagi petani kecil. Jika petani yang memiliki lahan yang luas dimungkinkan sudah memiliki kemampuan untuk finansial pemupukan jika menggunakan pupuk non subsidi. Koordinator BPP Kecamatan Bonang menyebutkan bahwa belum ada alasan jelas terkait dasar penentuan luas 2 ha sebagai batasan petani yang diusulkan untuk kartu tani.

Penyuluh melihat bahwa di desa banyak lahan sawah yang lebih dari 2 ha. Untuk lahan yang lebih dari 2 ha seperti tanah desa (*bondo deso*) disiasati dengan mencarikan KTP untuk memenuhi kuota luas lahan tersebut sehingga bisa tercakup per KTP adalah 2 ha, sedangkan 1 KTP dapat menampung beberapa lahan milik petani yang luasannya sempit. Beberapa petani penggarap diajukan

dengan digabungkan pada satu nama pamong (perangkat desa) setempat. Apabila ada tambahan petani yang mendaftar maka NIK atau KTP tersebut akan dihapus dan diganti petani yang mendaftar tersebut. Hal tersebut dimaksudkan agar semua luasan lahan yang ada di wilayah binaan dapat terpenuhi dan dapat diusulkan seluruhnya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dan kartu tani. Kelompok tani dalam melakukan pendataan petani dilakukan dengan *door to door* (dari satu rumah ke rumah yang lain) atau dikumpulkan di balai desa. Data yang sudah terkumpul kemudian direkap sementara oleh kelompok tani. Penyuluh selain melakukan koordinasi dengan kelompok tani, penyuluh juga berkoordinasi dengan perangkat desa sehingga petani dapat mengumpulkan persyaratan pengajuan kartu tani ke balai desa.

Kelompok tani yang mengajukan kartu tani tidak harus kelompok tani yang berbadan hukum. Mekanisme kartu tani yang diterapkan memuat keterangan bahwa kelompok tani ditentukan dengan model perblok minimal 25 ha sehingga diketahui dalam satu blok tersebut dapat terdiri dari luas lahan petani yang variatif. Menurut informan penelitian disebutkan bahwa konsep luasan lahan sehingga tidak menutup kemungkinan adanya pemilik lahan yang berada dalam satu blok disuatu desa bukanlah penduduk asli desa tersebut. Sehingga dalam pendataan petani untuk pengusulan kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang ditemukan kasus dimana petani penggarap ternyata bukan penduduk asli daerah setempat tetapi memiliki luasan lahan pada blok sawah di desa tersebut.

Adanya kebijakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak terkait pendataan seluruh luasan lahan petani yang ada di wilayah binaan (wilbin) tiap-

tiap penyuluh menimbulkan beberapa kasus terkait pendataan luas lahan. Kasus yang banyak terjadi walaupun luas lahan melebihi 2 ha akan tetap didata dan diusulkan pada program kartu tani. Konsep kelompok tani yang berdasarkan kerelaan menjadi anggota kelompok tani dapat memudahkan dalam pembinaan kelompok tani tetapi pada pelaksanaan program kartu tani petani yang rela atau tidak rela akan tetap didata menjadi anggota kelompok tani. Hal tersebut memunculkan adanya kasus petani di suatu kelompok tani tidak aktif dalam kelompok tani tetapi terdata untuk mendapatkan program atau bantuan. Selain itu adanya tambahan-tambahan pada suatu kelompok tani menjadikan jumlah anggota yang kelompok tani melebihi jumlah anggota kelompok tani yang ideal. Jumlah petani ideal dalam satu kelompok tani berkisar antara 25 sampai 30 petani.

Pengusulan kartu tani terkait pengajuan alokasi pupuk subsidi kemudian dicantumkan dalam pembuatan RDKK. Penentuan alokasi pupuk yang diajukan oleh penyuluh dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelompok tani dan berlanjut pada tingkat di atasnya. Walaupun pengusulan data alokasi pupuk sudah tersistem dalam SIMPI tetapi verifikasi data tersebut tetap harus melewati mekanisme berjenjang dari bawah ke atas. RDKK tingkat desa diverifikasi oleh kepala desa, di tingkat kecamatan RDKK akan diverifikasi oleh koordinator penyuluh atau P3K BPP Kecamatan Bonang dan ditingkat kabupaten maka data RDKK akan diverifikasi oleh kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak dan seterusnya hingga tingkat pusat. Proses validasi dan pengajuan dilakukan secara tersistem melalui sistem SIMPI. Hal ini dikarenakan karena untuk mengintegrasikan data antara tingkat bawah hingga tingkat atas. Hal tersebut

sesuai dengan pendapat Kurniawati dan Kurniawan (2016) yang menjelaskan bahwa aplikasi SIMPI memiliki keunggulan yaitu sistem *single entry* data, proses validasi yang berjenjang dan melalui internet atau *online*, bersifat transparan dan multifungsi dalam penggunaannya.

RDKK yang dibuat mencakup nama petani, NIK, luas lahan, komoditas yang dibudidayakan dan kebutuhan pupuk subsidi selama 1 tahun. Nama petani disesuaikan dengan nama yang tertera pada KTP dan data NIK nya sedangkan luas lahan dilihat dari luas lahan yang tertera di SPPT. Menurut keterangan koordinator penyuluh BPP Kecamatan Bonang menjelaskan bahwa komoditas yang ditulis dalam RDKK adalah komoditas yang masuk dalam UPSUS seperti padi, jagung, kedelai. RDKK pupuk subsidi di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang hanya mencantumkan komoditas padi karena luasannya yang terbesar dibanding komoditas yang lain. Komoditas yang lain seperti palawija atau hortikultura tidak dicantumkan karena petani yang mengusahakan komoditas tersebut tidak merata dalam suatu desa/kecamatan dan luasannya tidak besar.

Data lain yang tercantum pada RDKK yang dibuat penyuluh bersama pengurus kelompok tani adalah penentuan alokasi pupuk bersubsidi bagi petani. Alokasi pupuk bersubsidi per petani dihitung berdasarkan dosis anjuran pemupukan yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak perhektar lahan dan kemudian di konversikan sesuai lahan yang ada di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang. Dosis pupuk subsidi yang diberikan bagi petani disesuaikan dengan rekomendasi pemupukan untuk wilayah Kecamatan Bonang yaitu untuk luasan lahan 1 ha dengan kebutuhan pupuk subsidi urea 250 kg, SP-

36 100 kg, ZA 100 kg, Ponska 150 kg, Petrorganik 50 kg dan selanjutnya dikonversikan sesuai luas lahan yang dimiliki petani. Mengingat kebiasaan petani yang melebihi dosis ajuran dalam pemupukan maka menurut penyuluh untuk memenuhi kebutuhan alokasi pupuk bagi petani maka penambahan alokasi pupuknya akan dimasukkan dalam RDKK dengan batas toleransi atau estimasi jumlah maksimal yaitu 50 kg per jenis pupuk. Sistem kartu tani sudah secara otomatis ter-input Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan oleh Kementerian Pertanian.

Alokasi pupuk subsidi di RDKK yang banyak disoroti oleh petani adalah jenis pupuk subsidi SP-36 karena menurut petani bahwa alokasi untuk jenis pupuk tersebut tidak mencukupi kebutuhan pupuk SP-36 bagi petani. Walaupun demikian, petani memahami bahwa RDKK yang telah dibuat oleh kelompok tani bersama penyuluh, alokasi yang diusulkan didalamnya berdasarkan aturan alokasi pupuk yang disesuaikan dengan luasan lahan. Petani juga menyatakan bahwa permasalahan ketersediaan pupuk subsidi di lapangan tetap ada walaupun telah diterapkan program kartu tani. Sementara itu, adanya HET yang ditetapkan pemerintah pada kenyataannya belum sepenuhnya diterapkan oleh KPL. Kondisi tersebut yang menjadikan petani merasa pesimis dalam pengusulan program kartu tani termasuk pembuatan RDKK. Petani beranggapan bahwa perubahan atau perbaikan dalam penyaluran pupuk subsidi belum secara signifikan dirasakan oleh petani. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sriwinarti dan Faesal (2016) yang menjelaskan bahwa RDKK yang selama ini digunakan oleh pemerintah masih

belum diaplikasikan secara optimal mulai adanya kendala pada saat pendataan maupun pada saat implementasi.

Apabila dalam pembuatan RDKK ada perubahan dalam proses pendataan alokasi pupuk atau data petani yang lain maka data akan dikembalikan ke penyuluh yang membina wilayah binaan tersebut untuk dilakukan revisi data. Hal tersebut juga didukung kebijakan Kementerian Pertanian dimana pada hal alokasi pupuk diberikan hak bagi tingkat dibawahnya untuk melakukan realokasi pupuk. Adanya perbedaan antara alokasi pupuk subsidi yang diusulkan penyuluh melalui RDKK dengan kuota alokasi yang diberikan sebenarnya sudah disampaikan penyuluh kepada petani bahkan ketika awal pembuatan RDKK. Penyuluh menyatakan bahwa kuota alokasi pupuk subsidi yang diberikan cenderung kurang dari alokasi yang diusulkan pertama kali melalui RDKK karena adanya penyesuaian.

Petani selaku penerima subsidi pupuk memahami bahwa pupuk yang akan didapatkan adalah jumlah alokasi yang diusulkan pertama kali dalam RDKK. Petani beranggapan bahwa usulan pupuk di RDKK adalah usulan yang sesuai kebutuhan pemupukan yang biasa dilakukan petani. Petani kurang memahami adanya proses penyesuaian atau realokasi antara usulan dengan alokasi yang diberikan. Kondisi tersebut menjadikan petani merasa kekurangan dengan jumlah pupuk yang diterima dan berharap agar pupuk subsidi yang diberikan dapat sesuai kebutuhan pemupukan yang biasa dilakukan petani. Perbedaan harga pupuk oleh KPL dengan yang tertera dalam ketentuan HET yang telah ditetapkan di lapangan berbeda-beda antar KPL walaupun perbandingannya tidak signifikan. Perbedaan

kenaikan harga tersebut sesuai dengan kesepakatan antara petani sebagai penebus dan KPL sebagai penyalur.

Pengajuan kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang dilakukan setiap tahun itu artinya pada setiap tahun data petani dilakukan pembaharuan atau *update* data. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tidak semua penyuluh melakukan *update* data secara lengkap dan langsung kepada petani seperti alur pendataan pada awal pengusulan kartu tani. Pembuatan dan *update* RDKK yang dilakukan oleh penyuluh di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang dilakukan dengan mengambil data arsip yang pernah dibuat oleh penyuluh pada tahun sebelumnya. Menurut penyuluh luas lahan petani tiap tahun relatif sama dan terkadang hanya berbeda pada nama pemilik lahan. RDKK diperbarui atau dilakukan *update* data pada sekitar 3 bulan terakhir di setiap tahun karena RDKK yang dibuat akan digunakan pada tahun depannya.

Proses pendataan petani dalam pengusulan kartu tani terdapat beberapa kendala atau permasalahan. Kendala tersebut terkait pencocokan nama petani di KTP dengan nama yang tertera di SPPT, status kepemilikan lahan yang telah beralih nama dan jumlahnya karena pembagian waris, kurang aktifnya petani dalam melaporkan perubahan yang ada sehingga *update* data sulit dilakukan. Kesulitan dalam pencocokkan data petani juga terjadi pada saat penyuluh melakukan pencocokan antara data yang dibuat oleh pengurus kelompok tani dengan data SPPT yang dikumpulkan. Pengurus kelompok tani biasa menggunakan nama panggilan keseharian bagi anggotanya untuk data yang

dibuatnya sedangkan nama panggilan tersebut terkadang tidak sesuai dengan nama yang tertera di KTP atau di SPPT.

Penyuluh dalam pendataan kartu tani meminta bantuan perangkat desa dan kelompok tani karena perangkat desa yang juga mengerti terkait data petani yang ada di wilayah desanya dan juga melakukan pendataan luasan tanah di desa termasuk hal pajak di SPPT. Peran pengurus kelompok tani dalam pembuatan RDKK atau *update* data adalah bertugas mengecek dari data yang sudah ada apakah ada perubahan atau tidak karena data RDKK yang dibuat tiap tahun relatif sama walaupun demikian tidak jarang ditemui kasus nama penggarap yang berubah. Apabila ada petani yang belum terdaftar maka diperbolehkan untuk mendaftarkan diri menjadi penerima program kartu tani dan pupuk bersubsidi. Penyuluh membuat arsip untuk pencatatan dan pencocokan apabila ada petani yang belum terdaftar. Apabila ada perubahan data seperti nama ganda maka petani dan PPL melihat data sebelumnya dan mencoret nama yang perlu dirubah dari arsip yang pernah dibuat. Jika sistem melihat berdasarkan NIK secara otomatis dan hanya diakui di 1 kelompok tani.

Beberapa masalah yang sering muncul dalam pengusulan kartu tani dan penyusunan RDKK di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang adalah sebagai berikut:

a. Status Kepemilikan Lahan dan Luas Lahan

Status kepemilikan lahan pada beberapa petani dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Perubahan tersebut karena beberapa alasan seperti status lahan, status kepemilikan. Perubahan luas lahan yang diajukan di RDKK biasanya

berubah dikarenakan alih fungsi lahan. Menurut informasi informan diketahui bahwa banyak status lahan sawah di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang tersebut adalah lahan sewa. Dampak yang terjadi adalah apabila masa sewa sudah berakhir maka pemilik lahan akan menyewakan kepada petani penggarap lain. Sewa lahan biasa dilakukan dalam waktu satu tahun atau yang disesuaikan dengan pola tanam yang ada di wilayah tersebut. Adanya praktik pembagian warisan yang dilakukan oleh keluarga petani menjadikan status kepemilikan lahan berubah atau hanya perubahan pada penggarap sawah. Fakta lapangan menjelaskan bahwa petani yang mendapatkan warisan dari orang tuanya berupa sawah status kepemilikan di SPPT masih atas nama orang tuanya sehingga hal tersebut juga yang menjadikan kesulitan dalam *update* data.

Perubahan luas lahan di RDKK disebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian misalnya lahan yang sebelumnya ditanami padi berganti fungsi menjadi lahan untuk rumah atau fungsi yang lain. Lahan sawah yang dianggap tidak menghasilkan keuntungan yang maksimal maka pemilik lahan mengalih fungsikannya sebagai lahan kavling untuk perumahan. Beberapa desa di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang ada yang berada disepanjang sungai yang langsung mengarah ke laut atau berbatasan dengan wilayah aliran sungai payau. Lahan tersebut pada kondisi tertentu mendapatkan aliran (luapan) air yang mengandung garam maka air tersebut akan masuk ke lahan petani dan menyebabkan lahan sawah tidak maksimal digunakan sebagai lahan sawah. Beberapa petani misalnya di sebagian wilayah di Desa Gebangarum, Desa Gebang, dan Desa Karangrejo memilih untuk mengalih fungsikan lahan sawahnya

menjadi tambak ketika air asin (air payau) masuk kelahan tersebut dan akan kembali difungsikan sebagai lahan sawah ketika kondisi air sudah dianggap cocok untuk pengairan sawah. Hal tersebut yang menjadikan luas lahan yang tertera di RDKK dapat mengalami perubahan.

Perubahan data di RDKK selain dikarenakan perubahan status kepemilikan lahan dan luas lahan juga karena petani yang masuk di RDKK ada sebagian yang memiliki lahan yang berbeda di beberapa tempat dan lahan tersebut berada di blok sawah kelompok tani yang lain. Hal tersebut menurut koordinator penyuluh BPP Kecamatan Bonang kasus tersebut akan mengacaukan dalam pendataan karena luasan lahan yang terdata akan bertambah disebabkan adanya tambahan luas lahan dari anggota kelompok tani tersebut padahal orang tersebut diluar dari wilayah desa kelompok tani tersebut. Petani yang memiliki 2 SPPT yang berbeda akan diajukan dalam pengusulan kartu tani dengan data yang berbeda dan akan mendapatkan 2 kartu tani.

b. Sumberdaya Manusia Petani dan Penyuluh

Sumberdaya petani, pengurus kelompok tani dan penyuluh menjadi faktor yang menyebabkan kesulitan dalam pendataan petani untuk kartu tani dan penyusunan RDKK. Pengurus kelompok tani diwilayah kerja BPP Kecamatan Bonang ada yang murni hanya sebagai petani tetapi tidak sedikit yang juga merangkap di pemerintahan desa. Hal tersebut menjadikan kesibukan pengurus kelompok tani berpengaruh pada *timeline* pengumpulan berkas FC KTP dan SPPT yang dibuat bersama penyuluh. Sikap anggota petani yang aktif dan pasif juga

menjadikan pengurus kelompok tani kadang enggan untuk mendorong anggotanya untuk sesuai batas pengumpulan berkas pengajuan yang telah dibuat.

Salah seorang ketua kelompok tani yang sekaligus sebagai ketua gabungan kelompok tani di Desa Gebang bahkan menyebutkan bahwa ia dalam pengumpulan berkas pengusulan kartu tani hanya mendapatkan kritik dan protes dari anggotanya karena kurang aktifnya petani dalam mengumpulkan berkas tersebut sedangkan disatu sisi pengurus kelompok tani diminta penyuluh untuk sesuai *timeline*. Faktor yang berpengaruh dalam kelancaran pengusulan program kartu tani diantaranya adalah faktor usia, tingkat pengetahuan, lokasi maupun motivasi petani untuk mengapresiasi dan mematuhi kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah. Kurangnya pengetahuan dan ketertarikan pada program pemerintah menjadikan keengganan mengusulkan diri sebagai petani penerima kartu tani.

Kesulitan dalam dalam pendataan petani untuk penyusunan RDKK atau pengusulan kartu tani dikarenakan kurangnya jumlah sumberdaya manusia penyuluh BPP Kecamatan Bonang dan kurangnya intensitas pendataan di lapangan secara langsung. Penyuluh lebih memilih koordinasi dengan ketua kelompok tani dan perangkat desa untuk pendataan sehingga data lapangan harus melewati proses verifikasi atau pengecekan data. Menurut salah satu ketua kelompok tani di Desa Sumberejo yang sekaligus sebagai perangkat desa setempat mengatakan bahwa :

*“perlu pendataan berulang kali untuk kartu tani dan RDKK karena sampai sekarang data belum komplit”*

#### **4.4.2. Penerbitan Kartu Tani (Pencetakan, Pendistribusian dan Aktivasi)**

Proses selanjutnya dalam mekanisme program kartu tani setelah verifikasi data RDKK adalah penerbitan kartu tani. Data RDKK yang sudah diterima dan di *input* oleh admin kartu tani akan masuk kedalam sistem SIMPI dan data tersebut akan secara otomatis tersambung dengan sistem Bank BRI. Sistem tersebut menjadikan data yang diterima oleh BRI pusat berasal dari penyuluh (admin kartu tani) yang sebelumnya telah diunggah. Data tersebut kemudian diberikan kepada unit-unit BRI ditingkat bawah yang mengurus pencetakan atau penerbitan kartu tani. Wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang diberikan akses pelayanan kartu tani pada dua unit BRI yaitu KCP BRI unit Demak Kota dan KCP BRI unit Wedung. Adanya 2 unit pelayanan kartu tani ini dimaksudkan agar pelayanan dan penerbitan kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang dapat terlaksana dengan maksimal.

Fakta di lapangan diketahui bahwa ada suatu kasus dimana satu desa dilayani oleh 2 unit BRI yang berbeda sehingga pengorganisasian petani oleh gapoktan dalam penerbitan kartu tani mengalami kesulitan dan masalah. Hal tersebut menjadikan kelompok tani berjalan sendiri-sendiri dalam pengurusan kartu tani. Hal yang sama juga terjadi pada lingkup internal unit BRI yang melayani pencetakan kartu tani untuk petani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang. Antara KCP BRI unit Wedung dan KCP BRI Unit Demak Kota belum melakukan sinkronisasi bersama dalam pelaksanaan di lapangan terkait data kartu tani baik pada tahap kartu tani terdata, tercetak, terdistribusi, teraktivasi, dan

teraplikasi. Masing-masing KCP unit BRI hanya melakukan koordinasi kepada PPL yang membina wilayah pada lingkup pelayanan masing-masing.

Adanya keterbatasan SDM di BRI dan orientasi kegiatan utama yaitu mengurus hal-hal perbankan sehingga tugas untuk melakukan pencetakan dan pendistribusian terdapat kesulitan. Upaya BRI untuk mengatasi kesulitan tersebut adalah melakukan koordinasi dengan PPL yang mengampu wilayah desa yang akan di cetak dan di distribusikan kartu taninya. Pihak KCP BRI unit Wedung sendiri mencetak data berdasarkan data yang dikirim dari BRI pusat sehingga mengatakan bahwa mereka tidak ada kewenangan mencetak kartu tani walaupun mereka dapat melihat data petani disistem SIMPI. Terdapat 2 periode pencetakan kartu tani yang sudah berjalan selama ini di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang yaitu pencetakan periode pertama sekitar tahun 2017/2018 dan pencetakan periode kedua sekitar tahun 2019.

Perbedaan periode pencetakan tersebut terletak pada tampilan kartu tani yang tercetak dan mekanisme aktivasi kartu tani. Pencetakan periode pertama yaitu menerbitkan kartu tani dengan tampilan kartu yang didominasi warna dasar merah dan putih, dan gambar petani sedang membajak sawah dengan traktor dan tampilan belakang terdapat logo Provinsi Jawa tengah. Tampilan depan kartu tani tertera nama Bank BRI sebagai nama bank mitra yang bekerjasama dalam penerbitan kartu tani di Jawa Tengah. Berikut adalah tampilan kartu tani pada periode pertama dapat dilihat pada Ilustrasi 7.



Ilustrasi 7. Tampilan Kartu Tani Periode Penerbitan Pertama

Kebijakan pencetakan kartu tani pada periode pertama menurut pegawai KCP BRI unit Wedung berfokus pada intruksi dari BRI unit di atasnya. Kebijakan tersebut yaitu data yang masuk maka harus diupayakan untuk dicetak semua. Kebijakan tersebut diambil karena diharapkan agar penyerapan pupuk subsidi menggunakan program kartu tani dapat terlihat hasilnya. Berbeda halnya dengan pencetakan kartu tani pada periode kedua lebih berfokus pada penuntasan pencetakan bagi petani yang belum memiliki kartu tani, pengaktifan kartu tani dan peningkatan penggunaan kartu tani. Tampilan kartu tani periode pencetakan kedua memiliki tampilan berbeda jauh dengan periode pertama. Tampilan kartu tani depan gambar animasi 2 petani dan didominasi warna yang lebih beragam sedangkan tampilan belakangnya sama dengan kartu tani periode pertama. Tampilan depan bertuliskan HIMBARA yang menunjukkan keikutsertaan bank-

bank milik negara dalam program kartu tani misalnya bank BRI. Berikut adalah tampilan kartu tani pada periode kedua dapat dilihat pada Ilustrasi 8.



Ilustrasi 8. Tampilan Kartu Tani Periode Penerbitan Kedua

Perbedaan periode pencetakan menjadikan adanya kesenjangan dalam pengaplikasian kartu tani karena pada setiap periode memiliki permasalahan dan konsekuensi yang berbeda. Proses penerbitan kartu tani setelah kartu tani tercetak adalah pendistribusian kartu tani. Pendistribusian kartu tani dilakukan agar kartu tani dapat secara langsung diterima oleh petani yang bersangkutan. Pelaksanaan pendistribusian kartu tani menyesuaikan dengan periode pencetakan kartu tani dimana pada periode pertama kartu tani yang tercetak akan diberikan pihak BRI ke petani melalui penyuluh dan kemudian dilanjutkan ke kelompok tani hingga sampai ke petani. Hal tersebut menjadikan pada proses aktivasi kartu tani dilakukan bergantung kepada keaktifan individu petani. Berbeda dengan

penerbitan periode kedua kartu tani yang tercetak sudah secara otomatis teraktivasi sehingga dapat langsung diberikan/didistribusikan ke petani. Jumlah kartu tani yang tercetak untuk setiap desa berbeda-beda dan jumlahnya tidak banyak dalam sekali cetak tetapi dilakukan secara bertahap.

Sebagian kartu tani pada periode pertama sudah terdistribusi ke petani tetapi ada sebagian yang lain masih dipegang oleh penyuluh, gapoktan atau pengurus kelompok tani. Hal tersebut dilakukan karena kartu tani yang tercetak belum aktif dan untuk mengantisipasi adanya kekeledoran petani dalam menyimpan kartu tani sebelum melakukan aktivasi. Menurut salah satu ketua kelompok tani di Desa Tlogoboyo menyatakan bahwa petani yang kurang mendukung program kartu tani akan tidak menyimpan kartu tani dengan baik sehingga dimungkinkan hilang. Hal tersebut dikarenakan petani belum memahami pengaplikasian kartu tani serta petani belum merasakan manfaat dari adanya kartu tani tersebut.

Pendistribusian kartu tani oleh penyuluh disesuaikan dengan kondisi petani di lapangan. Pertemuan kelompok tani yang tidak rutin menjadikan perlu adanya sinkronisasi dalam pendistribusian kartu tani. Hal tersebut dilakukan agar kartu tani dapat secara tepat didapatkan oleh pemilik kartu tani tersebut. Selain itu pula agar dalam pendistribusian kartu tani dapat tercatat petani yang sudah mendapatkan kartu tani atau belum. Kurangnya koordinasi yang aktif antara petani, penyuluh dan pihak BRI dapat menyebabkan permasalahan dalam sinkronisasi data petani penerima kartu. Berikut adalah contoh pendistribusian

kartu tani yang diberikan oleh penyuluh kepada ketua kelompok tani dapat dilihat pada Ilustrasi 9.



Sumber: Dokumentasi BPP Kecamatan Bonang, 2019

#### Ilustrasi 9. Pendistribusian Kartu Tani

Kartu tani yang sudah terdistribusi kemudian masuk pada tahap aktivasi kartu tani. Aktivasi kartu tani dimaksudkan agar kartu tani dapat digunakan sebagai fungsi ATM dan fungsi pembaca alokasi pupuk bersubsidi. Proses aktivasi kartu tani sama seperti aktivasi kartu ATM biasa yaitu dengan melakukan pembuatan nomor PIN kartu tani. Menurut keterangan pegawai KCP BRI unit Wedung menyatakan bahwa nomor PIN tersebut bersifat rahasia sehingga hanya petani yang bersangkutan yang berhak menerima secara langsung kartu tani yang sudah aktif tersebut dari pihak BRI. Aktivasi kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang dilakukan sesuai ketentuan perbankan dari BRI.

Pihak BRI unit Wedung menyatakan bahwa mereka diberikan kewenangan untuk menentukan mekanisme aktivasi dan pendistribusian yang paling efektif dan efisien. Pihak KCP BRI unit Wedung melakukan 2 cara dalam aktivasi dan pendistribusian kartu tani yaitu cara “jemput bola” atau kunjungan lapangan dan cara biasa dengan pelayanan di kantor BRI. Pihak BRI dalam melakukan sistem jemput bola atau kunjungan lapangan di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang hanya mendatangi beberapa desa. Pihak BRI akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan penyuluh yang membina wilayah (desa) yang akan dilakukan kunjungan lapangan tersebut. Kegiatan kunjungan lapangan tersebut dilakukan pihak BRI dengan melaksanakan proses aktivasi kartu tani dilengkapi dengan membawa alat atau piranti dalam proses tersebut dan juga membuat daftar hadir.

Berdasarkan keterangan pegawai KCP BRI unit Wedung menjelaskan bahwa jumlah petani yang hadir tidak sesuai data yang ada, artinya petani yang datang tidak sesuai target yang direncanakan. Proses aktivasi yang dilakukan di lapangan membutuhkan waktu yang lama dikarenakan tidak semua petani yang terdaftar hadir sehingga harus menunggu kehadiran petani. Proses kunjungan lapangan yang dilakukan oleh BRI ke beberapa desa di tempatkan di balai desa masing-masing. Balai desa dipilih sebagai tempat kunjungan lapangan karena dapat mencakup petani dalam jumlah banyak. Waktu aktivasi di lapangan dimulai sejak pagi hingga sore hari dengan melalui penjadwalan kelompok tani yang dibuat oleh penyuluh.

Proses aktivasi dengan cara kunjungan lapangan oleh pihak BRI menurut keterangan ketua kelompok tani dan sekaligus ketua gapoktan di Desa Weding

bahwa proses tersebut memakan waktu hingga 1 minggu karena banyaknya petani yang masuk dalam data yang ada. Proses aktivasi dengan cara kunjungan lapangan memiliki kendala karena SDM dari pihak BRI yang kurang dan terbatasnya sarana penunjang (perlengkapan aktivasi kartu tani) menjadikan proses kunjungan lapangan tersebut tidak berjalan maksimal. Mekanisme aktivasi dalam penerbitan kartu tani yang kedua adalah dengan petani datang langsung ke kantor BRI. Pada saat aktivasi di kantor BRI beberapa kelompok tani datang dengan berbondong-bondong sehingga terjadi penumpukan antrian di kantor BRI.

Petugas KCP BRI unit Wedung menjelaskan bahwa adanya keterbatasan ruangan di kantor BRI sehingga tidak mencukupi jumlah petani yang datang akhirnya menjadikan antrian yang panjang. Walaupun demikian, salah satu ketua kelompok tani dari Desa Jatirogo menuturkan bahwa proses aktivasi membutuhkan waktu yang tidak lama. Keluhan yang dirasakan pada saat aktivasi adalah waktu antrian yang cukup lama sehingga beberapa petani sempat menyampaikan laporan kepada penyuluh terkait. Petani mengeluhkan waktu antrian yang lama sehingga merasa rugi karena waktu kerjanya hanya tergantikan dengan menunggu proses aktivasi dan menjadikan tidak adanya penghasilan bagi petani pada hari tersebut. Selain itu, tidak semua petani yang datang dapat melakukan aktivasi karena keterbatasan waktu dan tempat.

Petani pada saat melakukan aktivasi kartu tani dengan membawa KTP dan KK (Kartu Keluarga). Petani yang diusulkan dengan 2 pengusulan kartu tani maka melakukan 2 kali proses aktivasi kartu tani. Proses aktivasi pada periode kedua penerbitan kartu tani sudah dilakukan oleh pegawai BRI sehingga kartu tani yang

siap didistribusikan sudah sekaligus teraktivasi dengan diberikan nomor PIN standar pada kartu tani. Apabila petani ingin merubah nomor PIN pada kartu tani maka dapat secara pribadi mendatangi kantor KCP unit BRI. Proses penerbitan kartu tani yang meliputi pencetakan dan pendistribusian serta aktivasi kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang memiliki kendala selain dari keterbatasan teknis juga kendala dalam sinkronisasi data. Kendala sinkronisasi data kartu tani terkait data kartu tani yang telah diterbitkan oleh pihak BRI dengan data yang dipegang oleh penyuluh. Sinkronisasi data jumlah penerima kartu tani di Kecamatan Bonang belum bisa maksimal karena kurangnya koordinasi antara BRI dengan PPL pada awal-awal pendistribusian kartu tani pada tahun 2017.

Permasalahan sinkronisasi data kartu tani disebabkan kurangnya intensitas pengurus kelompok tani dalam mendata anggotanya yang belum atau sudah mendapatkan kartu tani serta yang sudah mengaktivasi kartu taninya. Demikian sebaliknya, petani kurang aktif dalam melaporkan perkembangan penggunaan kartu tani yang dimilikinya baik itu belum teraktivasi, sudah teraktivasi serta keberadaan kartu tani yang dimilikinya. Pihak BRI menyatakan bahwa adanya kebijakan rotasi pegawai dilingkungan internal BRI di Kabupaten Demak menjadikan pegawai BRI yang mengurus kartu tani pada periode pertama sudah dipindah tugaskan di wilayah lain sehingga data perkembangan kartu tani pada periode pertama belum terkolektifkan dengan baik dan tersinkronkan dengan data pegawai BRI yang mengurus kartu tani di periode kedua. Permasalahan tersebut menjadikan jumlah rekapan penerima kartu tani berbeda. Walaupun demikian, fakta dilapangan menjelaskan bahwa upaya sinkronisasi data kartu tani di wilayah

kerja BPP Kecamatan Bonang selalu diupayakan oleh penyuluh dan pihak BRI serta petani.

#### **4.4.3. Penggunaan Kartu Tani dan Penebusan Pupuk Bersubsidi**

Penebusan pupuk bersubsidi oleh petani dilakukan di Kios Pupuk Lengkap (KPL). Jumlah KPL resmi di Kecamatan Bonang yang terdata oleh BPP Kecamatan Bonang adalah 30 KPL yang tersebar di 18 desa. Ketersediaan pupuk di KPL didasarkan pada alokasi pupuk yang ditetapkan dalam RDKK. RDKK yang sudah jadi ditingkat desa selain digunakan untuk pengajuan kartu tani oleh penyuluh juga diberikan kepada KPL sebagai dasar pengajuan penebusan pupuk subsidi oleh KPL tersebut.

RDKK yang telah dilakukan verifikasi akan diberikan KPL kepada distributor sebagai dasar KPL dapat menebus pupuk subsidi dan distributor selanjutnya akan menyerahkan RDKK pada tingkat di atasnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Widia dan Apriadi (2017) yang menyatakan bahwa kewenangan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) disesuaikan dengan kemampuan produksi agar lebih fleksibel, efisien dan efektif. Apabila pemangku kebijakan ditingkat atas menyampaikan ada perubahan maka akan dirubah kuota pupuk yang dapat ditebus oleh KPL.

Jenis pupuk yang dapat ditebus oleh KPL resmi di wilayah Kecamatan Bonang adalah seluruh jenis pupuk subsidi meliputi urea, SP-36, ZA, Ponska dan petroganik. RDKK yang dipegang KPL sudah tercantum juga nama penyuluh beserta nama kelompok taninya sehingga KPL dalam melakukan pelayanan

penebusan pupuk subsidi dapat mengecek apakah petani termasuk dalam anggota kelompok tani di wilayah pelayanannya. Menurut penuturan penyuluh (Bapak Khoirul Miftah) menjelaskan bahwa setiap KPL memiliki wilayah pelayanan yang berbeda-beda sesuai dengan jarak terdekat dengan blok sawah disekitarnya. Artinya diharapkan mobilisasi kelompok tani dalam pembelian pupuk subsidi dapat dilakukan dengan mudah.

Pengecer atau KPL dalam melakukan penebusan pupuk subsidi kepada distributor tidak dilakukan dalam waktu sekali penebusan. Hal tersebut dilakukan sesuai aturan yang ditetapkan oleh distributor yaitu adanya kebijakan pelaporan kepada distributor. Laporan yang diberikan terkait pendistribusian pupuk subsidi oleh KPL dilakukan pada setiap bulan, sehingga setidaknya penebusan dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang memungkinkan KPL dapat melakukan laporan penebusan pupuk subsidi tiap bulan. Selain karena kebijakan tersebut, Ketua Paguyuban KPL Kecamatan Bonang menjelaskan bahwa alasan keterbatasan tempat atau gudang penyimpanan juga mempengaruhi kemampuan KPL dalam menebus pupuk subsidi. KPL dalam menebus pupuk subsidi menyesuaikan dengan kemampuan finansial yang dimilikinya. Pendistribusian pupuk subsidi dari distributor kepada KPL membutuhkan estimasi waktu antara 1 sampai 2 minggu sebelum bisa dilakukan pengiriman kembali oleh distributor.

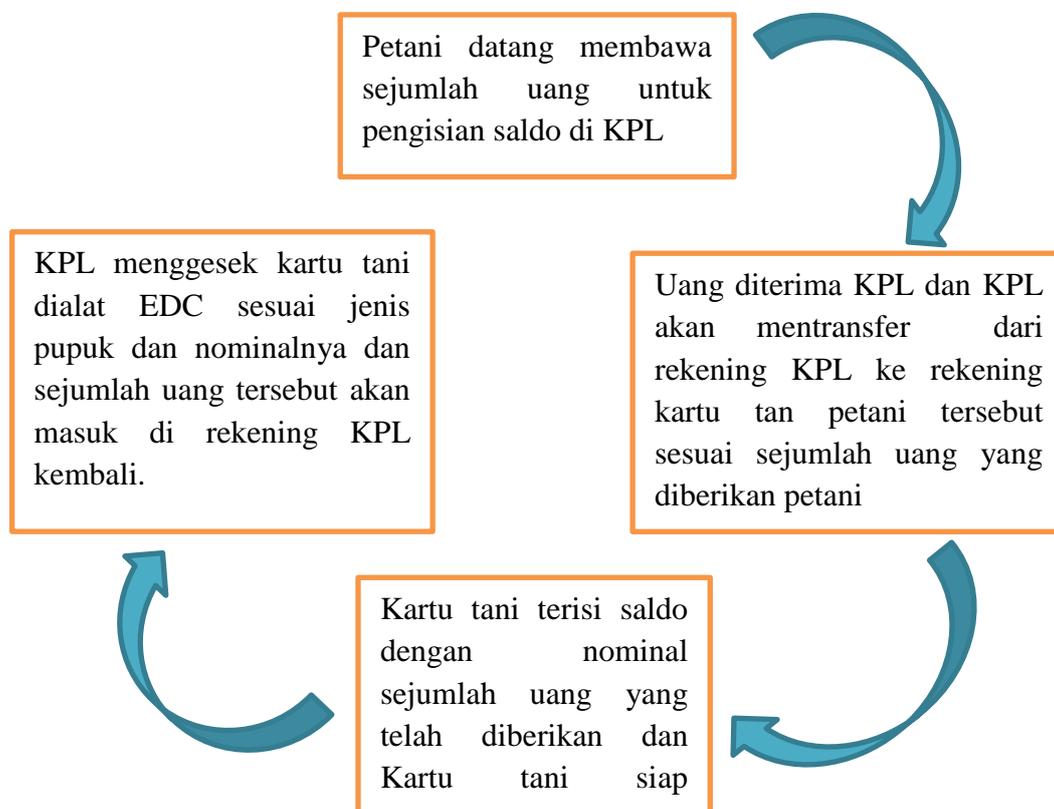
Peran KPL di wilayah Kecamatan Bonang dalam program kartu tani yaitu menyalurkan atau mendistribusikan pupuk subsidi kepada petani. Ketua paguyuban KPL Kecamatan Bonang menjelaskan bahwa kaitannya dengan program kartu tani maka KPL merupakan mitra pelaksana program kartu tani

yang melakukan penggesekan kartu tani melalui EDC yang telah dibagikan oleh pihak BRI. Media dalam pendistribusian pupuk subsidi menggunakan kartu tani adalah kartu yang sudah teraktivasi, sehingga walaupun kartu tersebut belum terisi saldo tetapi kartu tani tersebut sudah dapat terbaca kuota pupuk per petani dikartu tersebut. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan informasi bahwa hanya sekitar 50% kartu tani yang telah dibagikan kepada petani tetapi dari sejumlah kartu yang dibagikan tersebut belum semua kartu tani sudah teraktivasi. Hal tersebut menjadikan peran KPL dalam program kartu tani belum optimal karena hanya kartu tani yang telah teraktivasi yang dapat digunakan dalam penggesekan.

Berbeda dengan kartu tani yang terbit pada periode pertama, kartu tani yang terbit pada periode kedua sudah secara otomatis teraktivasi. Walaupun sudah teraktivasi tetapi kartu tani belum dibagikan oleh penyuluh karena jumlah kartu tani yang tercetak masih sedikit sehingga mengantisipasi adanya kesenjangan antar petani yang sudah mendapatkan dengan yang belum mendapatkan. Menurut data yang disampaikan pegawai KCP BRI unit Wedung sebagai pegawai BRI yang mengurus kartu tani di Kecamatan Bonang menyebutkan bahwa dalam SIMPI kartu tani yang telah tercetak  $\pm >50\%$ , sedangkan yang sudah teraktivasi sekitar  $\pm 50\%$ . Kurangnya antusiasme petani dalam mendukung program kartu tani menjadikan proses aktivasi terdapat resistensi. Kondisi tersebut menjadikan penebusan pupuk subsidi melalui kartu tani tidak berjalan dengan maksimal.

Kartu tani yang sudah teraktivasi kemudian dilakukan pengisian saldo untuk penebusan pupuk bersubsidi. Mekanisme pengisian saldo di bank sesuai pengisian saldo pada ATM seperti biasa. Proses pengisian saldo di BRI menurut

petani tidak membutuhkan waktu lama hanya saja proses antriannya yang membutuhkan waktu lama. Petani harus melakukan pengisian saldo di kartu tani agar perkembangan penyerapan pupuk subsidi dapat secara otomatis masuk di dalam sistem SIMPI. Petani yang melakukan penebusan pupuk subsidi dapat melakukan pengisian saldo melalui KPL. Mekanisme pengisian saldo di KPL dilakukan dengan beberapa tahapan yang dapat dijelaskan dalam diagram alur pada Ilustrasi 10 berikut.



Ilustrasi 10. Alur Pengisian Saldo Kartu Tani di KPL

Berdasarkan ilustrasi diatas dapat dijelaskan bahwa tahap pertama dilakukan dengan petani menyerahkan sejumlah uang dan kartu tani ke KPL. Proses selanjutnya adalah KPL akan mentransfer sejumlah uang yang diberikan

petani dari rekening miliknya ke rekening kartu tani petani tersebut. Kartu tani yang sudah terisi sejumlah uang atau saldo sudah dapat digunakan untuk melakukan penggesekan. Tahap ketiga yaitu proses penggesekan kartu tani. Penggesekan dilakukan per jenis pupuk subsidi yang kemudian uang yang sebelum masuk di kartu tani tersebut setelah proses penggesekan maka akan masuk kembali ke rekening KPL.

Pelaksanaan penebusan pupuk subsidi oleh petani menggunakan kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang dilakukan pada tahun 2018. Penggunaan kartu tani dilakukan berdasarkan arahan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak. Tidak semua petani dapat menggunakan layanan penebusan pupuk subsidi menggunakan kartu tani. Fakta lapangan menunjukkan bahwa banyak kartu belum tercetak dan teraktivasi, petani merasa kesulitan dalam menggunakan, pengecer ingin sistem yang tidak merepotkan dan keterbatasan jaringan internet dan tidak tercukupinya alat EDC (*Electronic Data Capture*). KPL selain sebagai pelaksana pendistribusian pupuk subsidi juga berperan sebagai agen BRILink sehingga dapat melakukan transaksi-transaksi yang lain selain penebusan pupuk subsidi. Penggunaan EDC oleh KPL di lapangan hanya sebatas untuk melihat informasi kuota pupuk karena banyak kartu tani yang telah teraktivasi tidak terisi saldo.

Penggunaan kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang belum dilaksanakan secara maksimal karena belum memaksimalkan fungsi kartu tani. Penggunaan kartu tani dilakukan secara bertahap melihat kondisi kesiapan petani terhadap program tersebut. Beberapa kebijakan mekanisme penebusan pupuk

subsidi ditetapkan oleh pemangku kebijakan kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang untuk meningkatkan kesiapan penggunaan kartu tani secara mandiri dan berkelanjutan. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah pengecekan nama petani di RDKK, KPL hanya boleh melayani petani di wilayah pelayanannya, jumlah pupuk yang diberikan KPL sesuai alokasi yang tertera di RDKK. Aturan pengecekan nama petani sebelum melakukan penebusan pupuk subsidi dilaksanakan walaupun petani belum seluruhnya mendapatkan kartu tani.

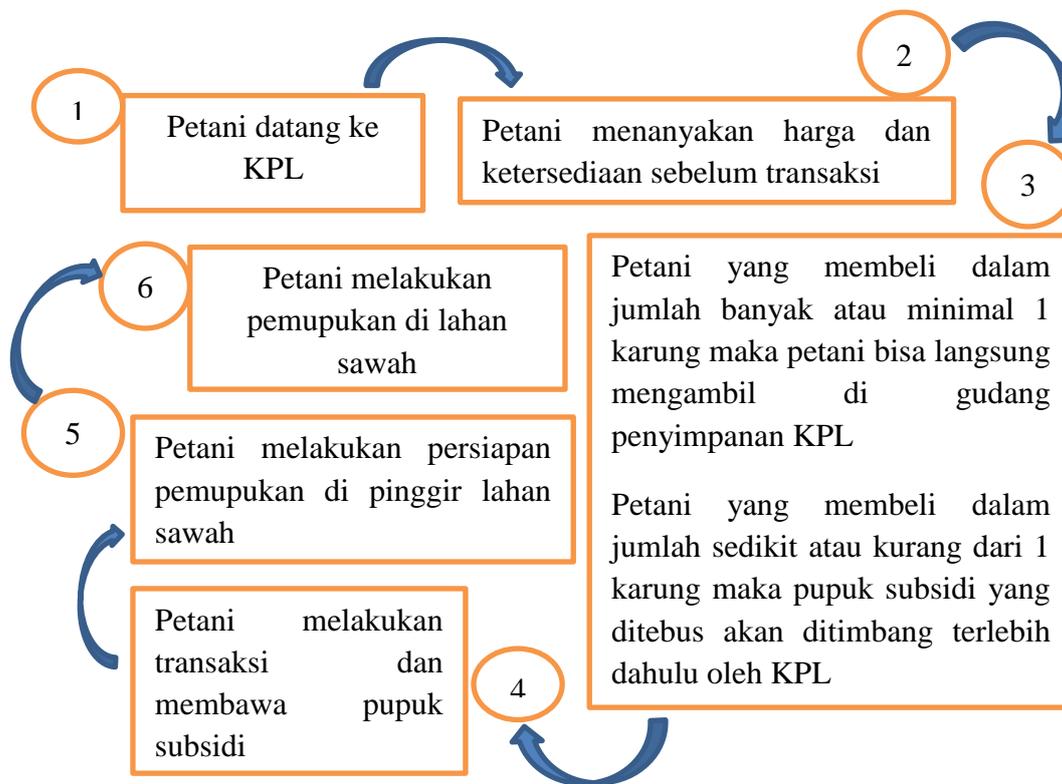
Terdapat beberapa perbedaan pelaksanaan penggunaan kartu tani di beberapa desa di Kecamatan Bonang. Secara umum pada masa awal penggunaan kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang, banyak petani yang lebih memilih menggunakan metode pembayaran masih lewat *cash* atau tunai. Perbedaan pelaksanaan penggunaan kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang sebagai berikut.

- a. Petani yang ingin menebus pupuk subsidi harus menggunakan bukti lembaran berisi tanda tangan dan cap ketua poktan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pengecekan bahwa petani tersebut merupakan anggota kelompok tani yang sesuai pembagian wilayah pelayanan KPL. Kartu tani milik seorang petani dapat digunakan oleh orang lain selagi mengetahui nomor PIN kartu tani tersebut. Kebijakan penggunaan kartu tani seperti ini diberlakukan di Desa Weding.
- b. Petani yang ingin menebus pupuk subsidi maka harus membawa FC SPPT sebagai bukti bahwa orang tersebut benar-benar petani yang mengolah lahan sawah di wilayah pelayanan KPL tersebut. KPL kemudian mengecek data

petani tersebut dari data RDKK yang dipegangnya. Apabila sawah petani tersebut merupakan lahan sewa maka SPPT pemilik lahan tersebut yang dibawa perlu dimintakan keterangan dari desa yang menjelaskan bahwa lahan tersebut sudah dialih kepemilikan (secara sewa). Penerapan aturan penggunaan kartu tani yang seperti ini diterapkan di Desa Serangan.

- c. RDKK yang dibuat oleh kelompok tani juga dipegang oleh pengecer tetapi ada KPL yang mengecek dan ada pula yang tidak mengecek RDKK karena pengecer merasa kesulitan membaca data RDKK. Kondisi tersebut dirasakan oleh seluruh KPL di Kecamatan Bonang.
- d. Petani hanya boleh menebus pupuk bersubsidi di KPL yang sudah ditentukan berdasarkan pembagian wilayah pelayanan KPL. Kondisi tersebut dilakukan oleh seluruh KPL di Kecamatan Bonang, walaupun demikian tetap ditemui adanya praktik KPL yang melayani petani diluar dari wilayah pelayanannya..

Proses penebusan pupuk bersubsidi oleh petani pada penggunaan kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dimulai pada tahun 2018. Penggunaan kartu tani selalu digencarkan hingga pada tahun 2019 BPP Kecamatan Bonang dapat menunjukkan perkembangannya. Hal tersebut pada kenyataannya di lapangan masih terdapat banyak praktik penebusan pupuk subsidi secara bebas walaupun tahun 2018 adalah masa awal penggunaan kartu tani. Proses penebusan pupuk bersubsidi oleh petani pada penggunaan kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dapat digambarkan melalui Ilustrasi 11.



Ilustrasi 11. Alur Penebusan Pupuk Subsidi

Pada masa penggunaan kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang petani yang akan melakukan penebusan pupuk bersubsidi harus membawa kartu taninya. Petani kemudian menyerahkan kartu tani kepada KPL dan bertanya terkait kuota yang diterima dan harga yang tertera di kartu tani. KPL akan mengecek alokasi dan harga pupuk subsidi bagi kartu tani yang sudah aktif, sedangkan kartu tani yang belum aktif akan diganti dengan pengecekan RDKK yang dipegang KPL. Pengecekan RDKK di PKL dilakukan oleh KPL sendiri atau petani yang akan menebus pupuk bersubsidi.

Salah satu KPL Desa Karangrejo menuturkan bahwa KPL merasa kesulitan dalam mengecek data petani di RDKK karena banyaknya petani yang

tercatat di RDKK dan seorang KPL di Desa Weding menambahkan bahwa KPL merasa kesulitan membaca tulisan di RDKK yang berukuran kecil sehingga meminta petani untuk mencari sendiri datanya di RDKK. Kuota pupuk yang tertera di RDKK sering lebih sedikit dengan kebutuhan petani. Apabila di RDKK petani yang melakukan penebusan pupuk subsidi kuota pupuknya misalnya hanya tertera 30 kg maka KPL akan menawarkan lebih dari RDKK tersebut yaitu 1 karung atau 50 kg untuk memudahkan penjualan. KPL memahami bahwa kelebihan dari jatah di RDKK merupakan upaya petani melakukan antisipasi ketika tidak optimalnya pertumbuhan tanaman setelah pemupukan dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan keterangan bahwa petani banyak mengeluhkan kurangnya stok pupuk subsidi yang ada di KPL pada saat pemupukan khususnya pada jenis pupuk SP-36. Petani mengeluhkan adanya kekurangan stok pupuk subsidi di KPL diakibatkan adanya praktik KPL yang melayani petani dari luar kelompok tani wilayahnya karena pupuk subsidi tersedia dan dapat ditebus petani dari luar wilayah pelayanan KPL tersebut dengan harga lebih tinggi. KPL sendiri menyebutkan bahwa adanya keterlambatan pengiriman pupuk subsidi dari distributor dan ada sejumlah kuota pupuk yang diajukan KPL tidak dikirim oleh distributor secara keseluruhan tergantung ketersediaan pupuk di distributor.

Mensiasati keterlambatan pengiriman pupuk subsidi oleh distributor maka KPL menjelaskan bahwa pupuk yang tersedia di gudangnya ada yang mengambil/dikirim dari KPL lain dan mengatakan bahwa hal tersebut sebagai bentuk “kerjasama-gotong royong” antar KPL. KPL yang memiliki stok jenis

pupuk tertentu sedangkan kelompok tani di wilayah pelayanannya belum memasuki masa pemupukan, maka jenis pupuk subsidi tersebut dapat dikirimkan ke KPL yang pada waktu yang sama kekurangan stok jenis pupuk subsidi tersebut.

Adanya biaya pengiriman pupuk subsidi akan dikalkulasi oleh KPL dan menjadikan kenaikan harga pupuk subsidi yang telah ditetapkan KPL. Hal tersebut kemudian dibebankan kepada petani dengan membeli melebihi HET yang telah ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sularno *et. al* (2016) yang menyatakan adanya penetapan kebijakan harga pupuk telah menyebabkan pasar pupuk domestik bersifat dualistik yaitu pasar subsidi dan pasar non-subsidi, langkanya pasokan dan lonjakan harga terjadi akibat perembesan pupuk dari satu wilayah ke wilayah yang lain pada pasar yang sama (pasar subsidi).

Harga Eceran Tertinggi atau HET sebenarnya sudah ditempelkan di kios yang dimiliki oleh KPL sehingga petani dapat melihat informasi tersebut. Ketua paguyuban KPL Kecamatan Bonang menjelaskan bahwa KPL diwajibkan menempelkan informasi HET di kios yang dimilikinya dan juga menempelkan beberapa atribut yang diwajibkan menurut aturan distributor. Ia juga menambahkan bahwa dalam menentukan harga lapangan yang ditetapkan oleh KPL dilakukan atas kesepakatan bersama antar KPL dan distributor. KPL yang ada di Kecamatan Bonang melakukan koordinasi penentuan harga pupuk subsidi di lapangan untuk wilayah Kecamatan Bonang. Hal tersebut dilakukan agar mengurangi disparitas harga pupuk subsidi antar KPL yang mencolok.

Keterangan berbeda terjadi di lapangan dimana fakta lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa perbedaan harga pupuk subsidi ditingkat KPL. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hendrawan *et. al* (2011) yang menyatakan bahwa kelemahan dalam konstruksi dasar kebijakan subsidi pupuk mendorong kelangkaan jumlah atau pasokan pupuk dan tingginya harga pupuk yang terkadang menjadikan Harga Eceran Tertinggi (HET) tidak diberlakukan. Hanya beberapa KPL di Kecamatan Bonang yang tetap menjual pupuk subsidi sesuai HET yang berlaku. Ada beberapa perbedaan harga pupuk subsidi antar desa di lapangan seperti terlihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Perbedaan Harga Pupuk Subsidi di KPL Kecamatan Bonang

No.	Jenis Pupuk Subsidi	HET	Perbedaan Harga di KPL
1.	Urea	Rp. 90.000,-	Rp. 90.000,- (relatif sama antar KPL)
2.	SP-36	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000 ,- (relatif sama antar KPL tetapi terdapat kasus kenaikan harga hingga Rp. 160.000,- )
3.	Ponska	Rp. 115.000,-	Rp. 130.000 (relatif sama antar KPL tetapi terdapat kasus kenaikan harga hingga Rp. 140.000,- )
4.	ZA	Rp. 70.000,-	Rp.80.000, (relatif sama antar KPL tetapi terdapat kasus kenaikan harga hingga Rp. 115.000,- )
5.	Petroganik	Rp. 20.000,-	RP. 20.000,- (relatif sama antar KPL)

Setelah petani menanyakan informasi melakukan pengecekan terkait harga dan ketersediaan jenis pupuk subsidi melalui kartu tani atau RDKK, KPL kemudian memberikan pupuk sesuai kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya. Proses pemberian pupuk subsidi dilakukan dengan penimbangan dan jika mendekati ukuran satu karung maka KPL menawarkan untuk pembelian satu karung (50 kg) sekaligus. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa KPL melakukan pelayanan penebusan pupuk subsidi ke petani sesuai kebutuhan yang diminta oleh petani walaupun melebihi dari alokasi yang tertera di RDKK.

#### **4.5. Problematika Implementasi Program Kartu Tani di Kecamatan Bonang**

Pemahaman terhadap sebuah problematika implementasi suatu program perlu memperhatikan sumber-sumber permasalahan yang ada. Hal tersebut dipahami bahwa sebuah implementasi kebijakan merupakan kumpulan dari tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan kebijakan. Problematika implementasi program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang diambil dari permasalahan pokok atau variabel-variabel pokok dalam implementasi program kartu tani. Permasalahan-permasalahan tersebut muncul karena adanya permasalahan non teknis dan permasalahan teknis. Permasalahan-permasalahan tersebut dikelompokkan menjadi 4 variabel. Permasalahan teknis tersebut yaitu permasalahan yang terkait komunikasi dan sumberdaya. Permasalahan non teknis sendiri seperti penerimaan pelaksana kebijakan (disposisi) dan struktur birokrasi.

Variabel komunikasi menunjukkan permasalahan pada penyampaian tujuan kebijakan kepada pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran program melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi program kartu tani. Variabel sumberdaya berkaitan dengan permasalahan ketersediaan sarana-sarana penunjang dalam implementasi kebijakan yang ada pada setiap tahapan pelaksanaan. Variabel disposisi berkaitan dengan permasalahan pada penerimaan pelaksana dan kelompok sasaran kebijakan terhadap program kartu tani. Variabel struktur birokrasi berkaitan dengan SOP kartu tani yang dipahami oleh pelaksana dan kelompok sasaran kebijakan itu sendiri. Variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh pada keberhasilan pelaksanaan program kartu tani selain juga apabila variabel tersebut tidak dilaksanakan dengan optimal akan menimbulkan permasalahan-permasalahan. Variabel-variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### **4.5.1. Komunikasi**

Komunikasi merupakan suatu aspek penting dalam pembahasan kebijakan publik. Pencapaian terhadap tujuan kebijakan publik tersebut dapat sistematis dan terintegrasi antar pelaksana maupun kepada sasaran program. Kebijakan pelaksanaan kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang dilakukan berdasarkan arahan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak termasuk dalam hal sosialisasi program kartu tani. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kabupaten Demak memulai *launching* program kartu tani untuk pertama kalinya di Kabupaten Demak pada 12 Januari 2017 di Pendopo Kantor Bupati

Kabupaten Demak. Sosialisasi kartu tani pada tahun yang sama juga dilakukan di kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak serta kantor – kantor BPP di tiap kecamatan.

Sosialisasi kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang pertama kali dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak. Sosialisasi kartu tani tersebut dihadiri oleh penyuluh, gapoktan, poktan, KPL, BRI, dan kepala desa di wilayah Kecamatan Bonang. Sosialisasi kartu tani yang diadakan oleh BPP Kecamatan Bonang secara massal dilakukan di Gedung Pertemuan (balai desa) Desa Bonangrejo. Desa Bonangrejo dipilih sebagai tempat pelaksanaan sosialisasi kartu tani karena dianggap paling strategis sehingga memudahkan perwakilan desa-desa untuk bisa menghadiri sosialisasi tersebut.

Komunikasi program kartu tani selain dilakukan melalui sosialisasi juga dengan memasukkan pembahasan program kartu tani dalam pertemuan kelompok tani atau pada saat kunjungan lapangan oleh penyuluh. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Jorgi *et. al* (2019) yang menyatakan bahwa peran kelompok tani dan pendampingan penyuluh lapangan dengan melakukan sosialisasi kartu tani pada saat pertemuan rutin kelompok akan meningkatkan pengetahuan petani tentang mekanisme kartu tani. Upaya tersebut guna menunjang pengkomunikasian tujuan kebijakan kepada pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran.

Mengingat bahwa proses pengkomunikasian tujuan program kepada pelaksana kebijakan penting untuk diperhatikan maka aspek-aspek dalam komunikasi dalam menunjukkan permasalahan dalam pelaksanaan program kartu tani. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa aspek-aspek komunikasi dalam

problematika implementasi program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang adalah transmisi, kejelasan dan konsistensi. Tiga aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### A. Transmisi

Transmisi pada komunikasi kebijakan pendistribusian pupuk subsidi melalui program kartu tani dilakukan agar apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat ditransmisikan kepada pelaksana kebijakan. Selain itu, agar tujuan kebijakan juga dapat dipahami oleh kelompok sasaran dalam hal ini adalah petani. Proses transmisi dilakukan agar pelaksana kebijakan memahami apa yang harus dikerjakan dalam mencapai tujuan kebijakan. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi distorsi dalam pemahaman pesan komunikasi yaitu tujuan 6 tepat yang ingin dicapai. Proses transmisi yang tidak optimal dapat menimbulkan hambatan penerimaan oleh kelompok sasaran maupun ketidaksinambungan antar pelaksana kebijakan karena tujuan kartu tani tidak tersampaikan dengan tepat.

Proses transmisi pada kebijakan program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang diartikan sebagai proses penerusan pesan (tujuan kebijakan) dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat masalah dalam proses transmisi kebijakan dimana proses transmisi masih bersifat normatif. Artinya proses transmisi hanya dilakukan sebatas pada pelaksanaan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan tetapi belum secara aktif dan berkelanjutan. Proses transmisi dilakukan pada acara sosialisasi dengan model ceramah atau kunjungan lapangan.

Kegiatan-kegiatan guna mentransmisikan tujuan program kartu tani belum disampaikan dengan optimal oleh pemangku kebijakan. Dampak dari belum optimalnya proses transmisi menjadikan pemahaman pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran menganggap program kartu tani hanya sebatas sebuah program pemerintah semata sehingga upaya pencapaian tujuan kebijakan belum secara aktif dilakukan. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan belum berkesinambungan yang tampak pada penyaluran informasi dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak kepada BPP Kecamatan Bonang akan mengalami perbedaan pada proses transmisi ditingkat pelaksana bawahnya maupun kepada kelompok sasaran. Hal tersebut menjadikan pemahaman ditingkat penyuluh dan ketua kelompok tani akan berbeda dengan pemahaman di tingkat petani.

Proses sosialisasi dan kunjungan lapangan belum menyampaikan tujuan 6 tepat program kartu tani tetapi hanya menjelaskan bahwa kartu tani adalah media baru untuk penebusan pupuk subsidi. Topik pembahasan pada sosialisasi dan kunjungan lapangan lebih berfokus pada pendataan petani untuk pengusulan kartu tani. Hal tersebut menjadi tidak optimal karena kegiatan sosialisasi dan kunjungan lapangan semestinya dapat digunakan untuk mentransmisikan atau menyalurkan maksud dari tujuan program kartu tani secara efektif sehingga semua pelaksana dan kelompok sasaran memiliki keselarasan pemahaman dan kebutuhan bersama akan program tersebut.

Hal lain yang menunjukkan bahwa proses transmisi dalam pengkomunikasian program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang belum maksimal adalah jumlah peserta yang diundang dalam sosialisasi program

kartu tani yang terbatas dan tidak adanya proses sosialisasi yang berkelanjutan. Hal tersebut menjadikan pemahaman tujuan program kartu tani hanya dipahami oleh peserta kegiatan tersebut. Petani sebagai sasaran program kartu tani tidak memahami tujuan program kartu tani secara jelas karena jalur komunikasi dari pembuat kebijakan (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) kepada petani melalui banyak tingkatan birokrasi.

Setiap tingkatan birokrasi tersebut menimbulkan perbedaan pemahaman yang dapat menimbulkan salah penerimaan atau salah penanggapan dari komunikasi tersebut (miskomunikasi) antar pelaksana kebijakan ditengah jalan sehingga tidak tepat sasaran. Proses komunikasi program kartu tani melalui kegiatan sosialisasi dan kunjungan lapangan dalam proses penyuluhan yang kurang aktif dan berkelanjutan di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang menyebabkan tingkat pengetahuan dan sikap penerimaan pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran yang berbeda-beda. Menurut Sapar *et al.* (2012) menyebutkan bahwa penyuluhan merupakan pendidikan non formal bagi petani dan keluarganya yang berfokus pada peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan keterampilan.

#### B. Kejelasan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa komunikasi dalam program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang dilakukan dengan model tatap muka secara langsung antara komunikator dengan komunikan melalui metode ceramah. Komunikasi secara langsung dipilih karena adanya perubahan-perubahan dalam kebijakan kartu tani dan pupuk subsidi sehingga perlu

disampaikan secara langsung. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi dampak distorsi informasi dari tingkat atas hingga ke tingkat bawah. Kejelasan suatu komunikasi termasuk didalamnya media, materi serta metode yang dilakukan dalam menyampaikan pesan.

Materi yang disampaikan penyuluh pada saat sosialisasi maupun kunjungan lapangan adalah lebih terkhusus pada manfaat kartu tani sebagai alat penebusan pupuk subsidi, sedangkan manfaat kartu tani yang lain tidak disampaikan dengan jelas. Walaupun demikian, pada beberapa kesempatan sosialisasi kartu tani yang lain, penyuluh juga menyampaikan tujuan dan manfaat kartu tani sebagai kartu ATM, penyampaian tentang pembuatan RDKK dan kuota pupuk subsidi. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa kejelasan dalam komunikasi terutama pada saat sosialisasi kartu tani di wilayah kerja BPP kecamatan Bonang belum optimal. Penyuluh BPP Kecamatan Bonang menjelaskan bahwa dalam proses komunikasi program kartu tani kepada pelaksana kebijakan belum dilengkapi dengan juknis yang dibuat dalam bentuk cetakan atau modul. Media yang digunakan hanya berupa ceramah dengan menggunakan media bantu yaitu *powerpoint*. Media tersebut dianggap kurang maksimal dipahami karena tidak bisa diulas kembali oleh ketua kelompok tani kepada anggota kelompok tani dalam suatu pertemuan kelompok tani.

Materi dalam komunikasi program kartu tani hanya berfokus pada manfaat sebagai media penebusan pupuk subsidi, sedangkan manfaat kartu tani sebagai ATM yang dapat digunakan untuk transaksi perbankan tidak dikomunikasikan secara intensif. Hal tersebut menjadikan motivasi petani dan KPL untuk

memanfaatkan kartu tani masih kurang. Apabila fungsi kartu tani untuk transaksi perbankan yang lain dijelaskan oleh pelaksana kebijakan baik penyuluh maka akan meningkatkan penggunaan kartu tani oleh petani. Berdasarkan hasil penelitian diketahui agar materi atau pesan komunikasi tersebut dapat diserap secara menyeluruh maka dilakukan strategi mendatangi sasaran program secara tatap muka.

### C. Konsistensi

Konsistensi dalam komunikasi kebijakan program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang dianggap belum maksimal dilaksanakan. Konsistensi menyangkut tentang intensitas komunikasi program kartu tani yang kontinyu dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses komunikasi melalui sosialisasi kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang yang dilakukan secara massal hanya dilakukan pada awal-awal program kartu tani diperkenalkan dari tingkat Kabupaten Demak yaitu tahun 2017. Kurangnya tindak lanjut setelah sosialisasi tersebut dirasakan oleh petani bahwa ada kesenjangan respon informasi dalam beberapa rentang waktu setelah itu. Kesenjangan tersebut karena petani atau pelaksana kebijakan beranggapan kurang intensifnya komunikasi program sehingga program kartu tani dianggap belum berkelanjutan. Hal tersebut memberikan dampak menurunnya antusias petani setelah sosialisasi program kartu tani tidak diberikan lagi.

Konsistensi komunikasi yang rendah melalui kegiatan sosialisasi program kartu tani diantisipasi dengan kunjungan lapangan oleh penyuluh kepada kelompok tani. Kunjungan lapangan tersebut dilakukan pada saat adanya pertemuan

kelompok tani sehingga penyuluh dapat langsung berkomunikasi dan menyampaikan program kartu tani kepada petani. Walaupun demikian karena keterbatasan kemampuan SDM penyuluh dan kemampuan kelompok tani dalam mengadakan pertemuan kelompok tani yang tidak maksimal menjadikan kegiatan kunjungan lapangan belum efektif. Hal tersebut menjadikan beberapa penyuluh memilih untuk melakukan proses komunikasi program kartu tani kepada ketua kelompok tani. Menurut penyuluh, ketua kelompok tani dianggap sebagai kontak tani sehingga diharapkan dapat menyerap dan menyampaikan informasi dari atau kepada petani. Pada tingkat wilayah binaan (desa) yang dilaksanakan oleh pemerintah desa setidaknya mengadakan pertemuan kelompok tani dan gabungan kelompok tani 2 kali dalam setahun yaitu setiap awal musim tanam. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak semua pertemuan kelompok tani membahas tentang program kartu tani.

Proses komunikasi program kartu tani melalui sosialisasi secara massal terkait program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang hanya dilaksanakan pada tahun pertama pelaksanaan kartu tani. Proses komunikasi melalui sosialisasi kartu tani secara massal semestinya dapat mengurangi perbedaan penafsiran dalam memahami tugas, wewenang serta upaya-upaya untuk mencapai tujuan kebijakan. Hal tersebut karena pada saat proses komunikasi melalui sosialisasi mengundang seluruh komponen pelaksana kebijakan serta petani sehingga terdapat ruang untuk membentuk keselarasan dalam mencapai tujuan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa konsistensi dalam komunikasi kartu tani masih rendah. Hal tersebut menjadikan implementasi

program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang tidak optimal dan masih terdapat problematika dalam implementasi tersebut.

#### **4.5.2. Sumberdaya**

Sumberdaya dalam suatu kebijakan tidak hanya berkaitan dengan sarana prasana pendukung berupa sarana fisik tetapi juga sumberdaya-sumberdaya yang lainnya yang bersifat non fisik. Setiap proses dalam suatu sistematis pelaksanaan program kartu tani membutuhkan sumberdaya-sumberdaya pendukung seperti tempat, anggaran, bahan informasi yang cukup, kewenangan yang diatur dalam SOP. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa yang menjadikan adanya problematika implementasi program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan adalah kurangnya sumberdaya pendukung. Kekurangan sumberdaya tersebut terjadi disetiap tahapan dalam mekanisme kartu tani, sehingga sumberdaya merupakan variabel penting untuk melihat problematika implementasi.

Analisis hasil penelitian menyederhanakan kompleksitas permasalahan pelaksanaan yang ada di lapangan agar terlihat fokus permasalahan sumberdaya di daerah penelitian. Sumberdaya dalam analisis problematika implementasi program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang ini adalah sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya sarana prasarana dan sumberdaya finansial. Sumberdaya-sumberdaya tersebut dipilih berdasarkan kompleksitas permasalahan yang secara nyata terjadi di lapangan. Berikut adalah kondisi dan masalah sumberdaya-sumberdaya dalam pelaksanaan program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang.

#### A. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pelaksana kebijakan program kartu tani di wilayah kerja meliputi komponen penyuluh, kelompok tani, KPL, pegawai BRI dan kepala desa. Sumberdaya manusia dilihat dari kuantitas dan kualitasnya dalam melaksanakan perannya dalam program kartu tani. Wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang tersebut dibina oleh 8 PPL dan 1 POPT dengan 18 desa binaan. Artinya 1 penyuluh dapat memiliki wilayah binaan (desa) sekitar 2 sampai 3 desa, sedangkan koordinator penyuluh BPP Kecamatan Bonang hanya memegang 1 desa. Personalia di BPP Kecamatan Bonang yang terdiri dari 8 PPL tersebut dianggap masih kurang untuk dapat mendata petani yang banyak sehingga untuk mengatasi keterbatasan itu penyuluh meminta bantuan ke ketua kelompok tani.

Ketua atau pengurus kelompok tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang diambilkan dari unsur perangkat desa. Adanya faktor usia pengurus kelompok tani, keterampilan menggunakan akses teknologi misalnya HP yang masih kurang aktif, serta kemauan untuk mengelola kelompok tani yang kurang sehingga perangkat desa dimasukkan dalam kepengurusan kelompok tani. Keterlibatan perangkat desa dalam kepengurusan kelompok tani memberikan pengaruh pada pelaksanaan program kartu tani. Keterlibatan perangkat desa dalam kepengurusan kelompok tani tersebut dapat mendorong sinkronisasi dengan arah kebijakan pembangunan pertanian di desa. Tetapi, disisi lain kesibukan sebagai perangkat desa sekaligus ketua kelompok tani menjadikan tidak dapat maksimalnya fungsi sebagai ketua kelompok tani. Hal tersebut berdampak pada kurang efektifnya pendataan petani, pengusulan RDKK serta pengawasan

perkembangan penggunaan kartu tani oleh anggota kelompok tani. Secara umum kurang aktifnya pengurus kelompok tani menjadikan manajemen dan dinamika kelompok tani tidak berjalan lancar.

Kurangnya pengurus kelompok tani yang aktif dalam melakukan manajemen pengelolaan dan koordinasi dilingkup internal maupun eksternal menjadikan beberapa masalah. Beberapa upaya pengorganisasian oleh ketua kelompok tani telah dilakukan oleh ketua kelompok tani sebagai tangan panjang penyuluh walaupun belum optimal dalam pelaksanaannya. Menurut Yani *et. al* (2010) menyatakan bahwa kelompok tani merupakan komponen utama dalam penyuluhan selain dari peran penyuluh pertanian. Peran-peran ketua kelompok tani dilaksanakan sekedar pada formalitas pelaksanaan tanggungjawab. Ketidakefektifan pengelolaan terlihat pada motivasi yang kurang untuk mengadakan pertemuan rutin, pengadaan anggaran kas kelompok serta regenerasi kepengurusan kelompok tani yang secara berkala dilakukan. Pendataan, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan peningkatan produksi belum maksimal. Kondisi tersebut menjadikan motivasi penggunaan kartu tani ditingkat kelompok tani belum optimal.

Permasalahan sumberdaya manusia pelaksana kebijakan kartu tani tidak lepas dari permasalahan di tingkat KPL (Kios Pupuk Lengkap). KPL sebagai penyalur pupuk subsidi di Kecamatan Bonang jumlahnya 30 KPL resmi yang terdata di BPP Kecamatan Bonang dan kemudian bergabung dalam suatu paguyuban KPL Kecamatan Bonang. Menurut ketua paguyuban KPL Kecamatan Bonang menjelaskan bahwa paguyuban KPL tidak ada kaitannya dengan kartu

tani, paguyuban dibentuk karena mengakomodir banyaknya KPL di Kecamatan Bonang. KPL merasa bahwa sistem penggesekan menggunakan kartu tani kurang dipahami oleh KPL sehingga pemanfaatan alat EDC tidak dimaksimalkan penggunaannya. KPL kurang telaten dalam melakukan penggesekan menggunakan alat EDC walaupun mereka juga paham posisinya sebagai agen BRILink yang diberikan alat EDC dari pihak BRI. Pihak BRI yang memberikan pelayanan dalam program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang adalah dua KCP BRI unit yang masing-masing mengurus 2 kecamatan. KCP BRI unit Wedung menyebutkan bahwa pihak BRI memiliki bagian sendiri yang mengurus EDC yaitu PAB untuk bagian yang mengurus kartu tani disebut unit.

KCP BRI unit Wedung menjelaskan bahwa mereka melayani wilayah Kecamatan Wedung dan Kecamatan Bonang dengan jumlah karyawan 20 orang. Jumlah tersebut menurut pegawai KCP BRI unit Wedung belum mampu mengakomodir pelayanan bagi petani di 2 wilayah pelayanannya yang menurut data petani berjumlah sekitar 10.000 orang. Hal tersebut berpengaruh pada praktik pengisian saldo kartu tani yang tidak maksimal. Keaktifan mengelola kerjasama dengan KPL sebagai agen BRILink sudah diupayakan dengan pemberian alat EDC walaupun dianggap masih kurang. Hal tersebut seirama dengan pendapat Susilowati (2016) yang menyatakan bahwa Bank sebagai *provider* kartu tani agar petani dapat mengakses dengan mudah maka harus menambah *outlet counter* bank jika diperlukan. BRI dalam melakukan perannya sebagai penerbit kartu tani juga berkoordinasi dengan penyuluh dan kepala desa selaku pimpinan di pemerintahan desa.

## B. Sumberdaya Sarana Prasarana

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang berbeda-beda pada tiap tahapan. Sumberdaya sarana prasarana yang dibutuhkan seperti ketersediaan jaringan internet yang memadai, rekening KPL dan alat EDC (*Electronic Data Capture*) bagi KPL. Kebutuhan pada tingkat kelompok sasaran hanya membutuhkan kartu tani yang terdistribusi secara keseluruhan dan kemudahan aktivasi. Penyuluh sendiri membutuhkan jaringan internet yang memadai dan laptop untuk membuat RDKK. Sumberdaya sarana prasarana juga harus diikuti dengan kesadaran untuk menggunakan sistem kartu tani tersebut.

Ketersediaan kebutuhan penyuluh untuk program kartu tani ini bisa dipenuhi secara pribadi oleh tiap penyuluh ditambah dukungan fasilitas di BPP Kecamatan Bonang berupa satu unit komputer. Kebutuhan kartu tani bagi petani secara bertahap diupayakan oleh BRI. Secara umum data petani sudah terkumpul tetapi belum semua kartu tani tercetak dan didistribusikan kepada petani. Menurut ketua kelompok tani menyatakan bahkan beberapa kartu tani yang dimiliki petani sudah hilang. Berdasarkan hasil penelitian tidak semua KPL memegang atau mendapatkan EDC. Ketua paguyuban KPL Kecamatan Bonang menjelaskan bahwa dari sekitar 30 KPL di Kecamatan Bonang hanya 20 KPL yang mendapatkan alat EDC, selain itu juga banyak EDC yang ditarik kembali oleh pihak BRI. Begitupun dengan keterangan penyuluh bahwa alat EDC belum komplit bagi KPL di Kecamatan Bonang.

Berbeda dengan keterangan petugas KCP BRI unit Wedung yang menyatakan bahwa alat EDC tersedia atau komplit tetapi alat EDC yang tidak digunakan KPL dalam jangka waktu sekitar 3 bulan akan ditarik dan dibawa ke kantor BRI untuk digunakan transaksi karena tiap bulan ada pajak untuk EDC dan agar tetap ada laporan. Pada masa pelaksanaan kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang, alat EDC tidak dimaksimalkan penggunaannya oleh KPL. Kurangnya pengaplikasian EDC oleh KPL disebabkan karena faktor KPL dan petani yang belum tertarik dan belum menguasai penggunaan alat EDC tersebut. KPL juga menambahkan bahwa ketersediaan jaringan internet juga sangat berpengaruh dengan kelancaran penggunaan EDC oleh KPL. Ketersediaan sarana prasarana teknis untuk mendukung pelaksanaan kebijakan program karu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang belum tersedia secara komplit. Sedangkan untuk sarana prasarana non teknis seperti ketersediaan gedung pertemuan untuk sosialisasi kartu tani, kendaraan bermotor untuk mobilitas penyuluh dalam pengambilan data petani sudah terpenuhi.

#### C. Sumberdaya Finansial.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam sosialisasi kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang pada awal periode setelah *launching* kartu tani dilakukan terdapat beberapa anggaran yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Anggaran sosialisasi kartu tani pada awal masa periode program kartu tani pada periode pertama berasal dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak tetapi itu hanya dilakukan sekali selama program kartu tani dilaksanakan. Setelah sosilaisasi pada periode kartu tani pertama tidak ada anggaran untuk proses

*update* data. Menurut penjelasan penyuluh di wilayah BPP Kecamatan Bonang bahwa anggaran untuk pengusulan dan pembuatan RDKK di awal program kartu tani pasca *launching* tersebut masih dipotong untuk keperluan pencairan dana.

Anggaran untuk pembuatan RDKK dan pengusulan kartu tani digunakan untuk proses administrasi seperti kebutuhan fotokopi berkas syarat kartu tani, cetak RDKK dan lain sebagainya. Besaran anggaran dalam pelaksanaan program kartu tani dianggap penyuluh di BPP Kecamatan Bonang masih kurang. Walaupun demikian, menurut penyuluh data petani juga penting bagi *database* penyuluh pribadi dan juga BPP Kecamatan Bonang sehingga meskipun anggaran untuk pelaksanaan dirasakan kurang tetapi penyuluh tetap melakukan penyampaian informasi dan sosialisasi terkait kartu tani kepada petani. Penyampaian informasi terkait kartu tani dilakukan dengan memasukkan pembahasan kartu tani pada pertemuan kelompok tani.

Kelompok tani yang belum aktif dalam melakukan mekanisme pengelolaan uang kas menjadikan tidak adanya anggaran untuk pertemuan kelompok tani. Pelaksanaan sosialisasi kartu tani yang dilakukan di beberapa desa di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang dilaksanakan menggunakan anggaran desa yang bersangkutan. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan kartu tani masih terdapat problem dalam penyediaan sumberdaya finansial. Pelaksanaan program kartu tani juga masih kurang dalam dukungan petani terkait kemampuan mengisi saldo kartu tani untuk penebusan pupuk subsidi. Kemampuan pengisian saldo yang kurang dikarenakan penggunaan finansial petani diutamakan untuk kebutuhan pokok keluarga petani.

### **4.5.3. Disposisi atau Sikap Pelaksana**

Pengertian disposisi dalam suatu kebijakan berkaitan dengan kemauan, kemampuan, keinginan serta kecenderungan pelaku kebijakan dalam melaksanakan kebijakan (Widodo, 2018). Pengertian disposisi dalam analisis problematika kebijakan program kartu tani berbeda dengan pengertian disposisi dalam tatanan suatu studi administrasi yang berkaitan dengan surat dinas. Disposisi kebijakan berkaitan dengan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan yang akan menimbulkan dukungan atau hambatan terhadap pelaksanaan kebijakan (Ramdhani dan Ramdhani, 2017). Disposisi dalam kebijakan program kartu tani berkaitan dengan bagaimana sikap, penerimaan dan tanggapan, kemauan, serta kecenderungan pelaksana kebijakan kartu tani terhadap program yang dijalankan. Disposisi dalam analisis problematika kebijakan kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang juga berkaitan dengan insentif dari pemangku kebijakan yang diberikan kepada pelaksana kebijakan. Permasalahan dalam pelaksanaan program kartu tani terkait disposisi atau sikap pelaksana dijelaskan sebagai berikut.

#### **A. Sikap Pelaksana**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara umum penyuluh memberikan tanggapan positif dalam pelaksanaan program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang. Tanggapan positif tersebut dilandaskan atas kebutuhan data petani bagi penyuluh. Hal tersebut terlihat dari sikap penyuluh dalam menyampaikan program kartu tani kepada petani melalui kunjungan kelompok serta proses komunikasi yang lain. Selain itu, sikap dukungan penyuluh

juga terlihat dari pendampingan dalam pengusulan kartu tani, pendataan petani dan pembuatan RDKK.

Penyuluh di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang disatu sisi merasa dalam kondisi dilematis karena kompleksitas permasalahan dalam pelaksanaan program kartu tani. Penyuluh menilai bahwa minat dan motivasi petani sebagai kelompok sasaran terhadap program kartu tani masih rendah. Hal tersebut menurut penyuluh perlu diselesaikan dan dipahami bersama tidak hanya pada tingkat pelaksana kebijakan yang berhadapan langsung dengan petani tetapi juga pelaksana kebijakan di tingkat kabupaten maupun provinsi. Sikap dilematis penyuluh dalam melaksanakan perannya sebagai pelaksana kebijakan program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang dapat dilihat dari berbagai pernyataan yang disampaikan sebagai berikut:

1. *“Program kartu tani bisa dicukupkan ataupun misal dilanjut maka data harus benar-benar valid dan di lapangan untuk pengupdatean data itu sulit”.*
2. *“Program kartu tani dianggap kurang cocok dan dapat diganti dengan program yang lain”.*
3. *“Sebenarnya konsep kartu tani sudah bagus karena langsung kepada pengguna tetapi penerapannya harus perlu evaluasi karena tidak semudah membuat konsep”.*

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara umum terdapat 2 pandangan petani terhadap program kartu tani yaitu petani yang menolak dan petani yang menerima. Pandangan-pandangan yang muncul pada petani dikarenakan kurangnya pengetahuan petani terhadap program kartu tani. Petani yang menerima konsep program kartu tani secara umum adalah pengurus

kelompok tani dan petani yang aktif mengikuti pertemuan kelompok tani atau sosialisasi kartu tani. Hal tersebut seperti yang disampaikan Moko *et. al.* (2017) yang menyatakan bahwa persepsi petani berkaitan dengan kedudukannya dalam kelompok tani, apabila seorang petani aktif dalam kelompok tani maka persepsi terhadap program kartu tani juga semakin baik.

Penerimaan petani terhadap konsep kartu tani karena dianggap dapat mengatasi permasalahan pendistribusian pupuk subsidi. Penerimaan tersebut hanya terbatas pada penerimaan terhadap konsep kartu tani, tetapi bertolak belakang dengan pelaksanaan program kartu tani di lapangan. Penggunaan kartu tani dalam penebusan pupuk subsidi yang masih rendah ditingkat petani menunjukkan bahwa petani memberikan resistensi atau hambatan terhadap program kartu tani tersebut. Hal tersebut terjadi karena kartu tani yang sudah tercetak dan terdistribusi tidak difungsikan secara optimal saat pembelian pupuk subsidi di KPL.

Kondisi SDM terampil dalam penggunaan kartu tani dan alat EDC yang kurang menyebabkan petani enggan menggunakan kartu tani untuk penebusan pupuk subsidi. Kondisi tersebut dikarenakan faktor usia lanjut, pengetahuan kurang, tingkat pendidikan yang rendah serta pendampingan penggunaan kartu tani yang tidak berkelanjutan. Kurangnya ketertarikan KPL untuk menggunakan EDC disebabkan karena sikap KPL yang menyatakan bahwa penebusan pupuk subsidi menggunakan kartu tani merepotkan bagi KPL. Adanya beberapa tahapan dalam penggunaan kartu tani melalui EDC membutuhkan waktu lebih lama dibanding dengan transaksi secara manual.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa beberapa KPL di wilayah Kecamatan Bonang memberikan kemudahan kepada petani dalam penebusan pupuk subsidi dengan sistem hutang. KPL menyatakan bahwa apabila menggunakan kartu tani maka proses penebusan pupuk subsidi tidak dapat fleksibel dan bebas. Hambatan yang diberikan KPL terhadap program kartu tani menjadikan pelaksanaan program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang tidak optimal. Walaupun KPL kurang mendukung program kartu tani karena kesulitan dalam pelaksanaannya tetapi KPL memberikan sikap positif pada konsep kartu tani. Sikap positif tersebut seperti yang dijelaskan oleh ketua paguyuban KPL Kecamatan Bonang yang mengatakan bahwa kartu tani bertujuan untuk meminimalisir permasalahan penebusan pupuk subsidi misalnya dalam hal penimbunan pupuk subsidi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Penerimaan positif terkait program kartu tani dalam mengatasi permasalahan pendistribusian pupuk di Kecamatan Bonang juga diberikan oleh perangkat desa di Kecamatan Bonang. Perangkat desa di Kecamatan Bonang secara umum mendukung konsep yang diberikan pemerintah melalui program kartu tani walaupun pada pelaksanaannya belum efektif dan optimal. Perangkat desa menyatakan bahwa perlu adanya perbaikan dalam manajemen pembinaan kelompok tani agar muncul pengaruh peranan sosial dalam kelompok tani tersebut. Peranan sosial yang ada dalam suatu kelompok tani dapat memberikan sugesti agar petani dapat menerima dan memahami tujuan program kartu tani. Menurut Kartono (2011) menjelaskan bahwa peranan sosial akan memberikan

pengaruh yang dapat berupa sugesti, larangan, maupun dukungan kepada masyarakat secara luas untuk melakukan suatu hal.

#### B. Insentif

Insentif dalam analisis permasalahan pelaksanaan kebijakan kartu tani di wilayah BPP Kecamatan Bonang berkaitan dengan apresiasi atau dukungan yang diberikan oleh pelaksana kebijakan tingkat kabupaten kepada pelaksana kebijakan tingkat kecamatan. Insentif dalam pelaksanaan program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang diberikan oleh Dinas pertanian dan Pangan Kabupaten Demak selaku pelaksana kebijakan di tingkat kabupaten. Insentif pada tingkat kelompok tani diberikan dari pihak desa atau gapoktan kepada kelompok tani. Berbeda pada komponen KPL dimana insentif diberikan oleh BRI selaku mitra dalam penggunaan dan proses transaksi pada program kartu tani. Insentif – insentif yang diberikan dapat berupa dukungan finansial, sarana prasarana, apresiasi ataupun bentuk-bentuk insentif yang lain.

Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada penyuluh di tingkat kecamatan dalam program kartu tani adalah adanya biaya operasional yang hanya diberikan pada awal program dilaksanakan yaitu tahun 2017. Upaya untuk meningkatkan penggunaan kartu tani di lapangan dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak dengan mengadakan kegiatan kartu tani *award* tersebut. Kegiatan stimulasi yang diberikan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak berupa kartu tani *award* hanya dilakukan selama 1 kali. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pelaksanaan transaksi kartu tani dalam rangka kartu tani *award* masih didapatkan banyak praktik

transaksi yang tidak sepenuhnya dilakukan oleh petani dan KPL secara mandiri. Artinya keterlibatan penyuluh dalam penggesekan kartu tani masih cukup dominan. Hal tersebut juga sebenarnya dipahami oleh penyuluh tidak dapat meningkatkan keaktifan dan partisipasi.

Insentif yang diberikan oleh pemangku kebijakan kepada penyuluh di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang dirasakan penyuluh masih kurang. Hal tersebut senada dengan pendapat Ashari dan Hariani (2019) yang menjelaskan bahwa kondisi lingkungan atau sosial budaya masyarakat, sumberdaya anggaran yang kurang, karakteristik dan kemampuan agen pelaksanaan menjadi faktor penghambat program kartu tani. Menurut koordinator penyuluh BPP Kecamatan Bonang, dukungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak untuk pengembangan kompetensi penyuluh dirasakan kurang apresiatif. Kurangnya insentif dalam pelaksanaan kartu tani juga menjadikan tidak adanya sosialisasi yang intensif yang diadakan oleh BPP Kecamatan Bonang.

Secara umum kurangnya insentif bagi pelaksana kebijakan program kartu tani di wilayah kerja BPP kecamatan Bonang akan menurunkan motivasi pelaksana dalam menjalankan perannya. Kurangnya insentif yang diberikan pemerintah sebagai pembuat kebijakan akan menimbulkan kurangnya dukungan dari pelaksana kebijakan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Faqih (2014) yang menyatakan bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah yang dimaksudkan untuk pengembangan kompetensi kelompok hendaknya lebih kepada pengembangan kepemimpinan lokal serta pengembangan-pengembangan sumberdaya manusia.

#### **4.5.4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi dalam analisis kebijakan kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang berkaitan tentang bagaimana pelaksanaan program kartu tani dapat sesuai dengan aturan pelaksanaan yang ada. Struktur birokrasi selain berkaitan dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) juga berkaitan dengan standar keberhasilan program tersebut dan pembagian kerja dalam mekanisme program kartu tani. Standar keberhasilan menjadi sebuah gambaran apakah dalam pelaksanaan program kartu tani oleh tiap pelaksana kebijakan sesuai dengan standar atau tujuan program kartu tani yang dibuat oleh pembuat kebijakan. Standar keberhasilan antara satu pelaksana dengan pelaksana yang lain dapat berbeda tetapi perbedaan tersebut harus tetap mengarah pada pencapaian tujuan kebijakan.

Struktur birokrasi dalam suatu analisis implementasi kebijakan juga mengisyaratkan bahwa terdapat pembagian kerja antar pelaksana kebijakan yang menyebabkan beberapa model koordinasi. Model-model koordinasi yang dilakukan oleh antar pelaksana kebijakan akan berpengaruh pada keefektifan suatu langkah pencapaian tujuan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam implementasi program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang, struktur birokrasi menjadi salah satu variabel yang patut diperhatikan. Hal tersebut dikarenakan struktur birokrasi dalam hal ini pelaksanaan SOP dan pembagian kewenangan menjadi permasalahan yang terjadi pada komponen pelaksana kebijakan baik ditingkat pusat maupun ditingkat pelaksana lapangan.

Pola-pola koordinasi dan ketegasan dalam pelaksanaan SOP yang kurang menjadikan kendornya pelaksanaan program kartu tani di lapangan. Perbedaan pemaknaan komponen pelaksana kebijakan tentang posisi dan perannya dalam mekanisme program kartu tani menjadikan perbedaan pencapaian program kartu tani. Perbedaan standar pencapaian tersebut berdampak pada pandangan komponen dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Satu komponen dapat berbeda pandangan dengan merasa telah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tetapi menurut komponen lainnya tugas dan wewenang tersebut belum dioptimalkan.

SOP dalam pelaksanaan kebijakan program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang berkaitan dengan pengertian atau pengetahuan kartu tani, standar keberhasilan yang dimengerti serta mekanisme program kartu tani yang dipahami oleh pelaksana kebijakan. Hal tersebut dikarenakan transfer pengetahuan tentang kartu tani terkait SOP dan standar keberhasilan juga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dari pelaksana kebijakan program kartu tani. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyuluh di BPP Kecamatan Bonang kurang memahami SOP kartu tani secara lengkap dan rinci. Penyuluh di BPP Kecamatan Bonang menjelaskan bahwa pada awal pelaksanaan program kartu tani setelah *launching* program kartu tani mereka tidak mengetahui secara rinci tentang SOP yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. Penyuluh juga menjelaskan bahwa mereka tidak mendapatkan buku atau modul yang berhubungan dengan peraturan yang dibuat oleh pembuat kebijakan kartu tani dalam bentuk petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis.

Penyuluh mendapatkan penjelasan SOP kartu tani melalui sosialisasi kartu tani yang pernah dilakukan di beberapa tempat. SOP kartu tani yang secara umum dipahami oleh penyuluh di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang adalah yang berasal dari intruksi gubernur dan intruksi dinas, surat edaran serta informasi dari sosialisasi yang diadakan. Hal yang menjadi standar pelaksanaan bagi penyuluh BPP Kecamatan Bonang secara intruksional adalah arahan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak agar kuota pupuk subsidi terpenuhi untuk seluruh lahan yang ada di wilayah kerja masing-masing BPP di Kabupaten Demak. Hal tersebut menjadikan acuan bagi penyuluh bahwa tugas dan kewajiban yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan program kartu tani di wilayah kerjanya adalah mengupayakan pengusulan bagi seluruh petani yang mempunyai lahan di wilayah binaannya.

Arus informasi satu pintu dan wewenang dalam pendataan petani menjadikan tidak semua penyuluh mengerti kebijakan pupuk subsidi secara luas. Artinya tidak semua informasi yang ada dalam kebijakan pupuk subsidi dan kartu tani diketahui oleh penyuluh seperti arah kebijakan pengurangan pupuk subsidi. Permasalahan kebijakan pengurangan kuota pupuk subsidi tidak diketahui secara rinci oleh penyuluh. Informasi yang didapatkan oleh penyuluh berupa surat edaran, intruksi dinas dan pemangku kebijakan terkait, materi sosialisasi serta informasi lain yang disampaikan saat kegiatan koordinasi.

Koordinator penyuluh di BPP Kecamatan Bonang menjelaskan bahwa SOP kartu tani diharapkan dapat mendorong petani untuk menggunakan pupuk sesuai dengan dosis yang disarankan oleh penyuluh. Koordinator penyuluh BPP

Kecamatan Bonang menyatakan bahwa SOP pengusulan kartu tani dianggap penyuluh belum dapat dimaksimalkan sesuai yang tertera dalam SOP yang ada. Pengusulan kartu tani dianggap masih menyulitkan bagi penyuluh karena adanya kewajiban *update* data yang pada pelaksanaannya masih banyak terdapat permasalahan. Hal tersebut senada dengan penjelasan admin kartu tani Kecamatan Bonang yang menyatakan bahwa ada beberapa permasalahan dalam penerapan SOP kartu tani di lapangan.

Penyuluh memandang ketegasan dari pemerintah selaku pembuat kebijakan kartu tani dalam pelaksanaan SOP kartu tani masih kurang. Aturan kelembagaan dalam SOP kartu tani sudah cukup ideal tetapi pada pengaplikasiannya belum maksimal diterapkan oleh penyuluh BPP Kecamatan Bonang. Koordinator penyuluh BPP Kecamatan Bonang menambahkan bahwa konsep kartu tani yang menyasar pada individu petani akan mengurangi kedinamisan dalam kelompok selain itu pengawasan pemanfaatan kartu tani tergantung penerimaan individu petani terhadap kartu tani.

Ketua kelompok tani yang berperan sebagai pelaksana kebijakan program kartu tani pada tahap pengusulannya sekaligus sebagai sasaran program itu sendiri merasakan pelaksanaan program kartu tani dilematis bagi ketua kelompok tani. Tugasnya dalam pengusulan kartu tani adalah mendorong adanya partisipasi aktif anggota kelompok tani untuk mengumpulkan syarat pengusulan kartu tani dan ikut serta memahami kebutuhannya di dalam RDKK. Berbeda kenyataannya di lapangan dimana anggota kelompok tani tidak aktif dan cenderung memberikan

resistensi terhadap program kartu tani tersebut. Akibatnya sikap petani tersebut yang menghambat pengumpulan syarat pengusulan kartu tani.

Kondisi dilematis tersebut juga disebabkan aturan dalam penebusan pupuk subsidi yang berubah-ubah. Kondisi tersebut menjadikan petani beranggapan bahwa program kartu tani belum secara tegas dilaksanakan. Fenomena yang terjadi pada masa penggunaan kartu tani ternyata didapatkan praktik bahwa yang tidak memiliki kartu tani masih bisa menebus pupuk subsidi atau praktik-praktik penyimpangan yang lain. Hal tersebut menjadikan posisi dilematis bagi ketua kelompok tani maupun petani itu sendiri karena disatu sisi penyuluh mendorong anggota kelompok tani harus menggunakan kartu tani tetapi di sisi lain pelaksanaan program kartu tani di lapangan masih terdapat permasalahan yang kompleks. Kurangnya penerapan dan pemberlakuan sanksi yang tegas bagi pelanggar atau oknum yang tidak sesuai dengan SOP menjadi hambatan tersendiri pada implementasi program kartu tani.

Kurangnya ketegasan dalam penerapan SOP harus menggunakan kartu tani tersebut terlihat di lapangan bahwa penebusan pupuk subsidi masih melonggarkan pembelian secara bebas dan tidak menggunakan kartu tani. Petani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang mengerti anjuran untuk menggunakan kartu tani tetapi tidak dilaksanakan. Petani beralasan bahwa ketika masa pemupukan pupuk sering kosong atau cepat habis setelah distok oleh distributor sehingga manfaat kartu tani belum dirasakan secara maksimal oleh petani. Perbedaan pemahaman terkait program kartu tani ditingkat pelaksana kebijakan menjadikan perbedaan standar keberhasilan yang ditetapkan oleh tiap komponen

pelaksana kebijakan. Hal tersebut dapat disebabkan karena perbedaan pengetahuan, interpretasi serta permasalahan-permasalahan yang terjadi pada setiap komponen pelaksana kebijakan.

Pencapaian untuk mengatasi permasalahan tersebut menjadikan standar keberhasilan bagi setiap pelaksana kebijakan berbeda-beda walaupun demikian setiap pelaksana kebijakan berusaha mencapai standar keberhasilan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan kartu tani yaitu 6 tepat. Menurut ketua kelompok tani Desa Sumberejo mengatakan bahwa permasalahan mendasar dari kartu tani adalah ketersediaan pupuk subsidi, sehingga kartu tani dikatakan berhasil jika persediaan pupuk subsidi tersedia. Ketersediaan pupuk yang masih sulit serta minimnya penggunaan kartu tani perlu pendampingan dari berbagai pemangku kebijakan baik pihak pelaksana maupun pengawas atau KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk Subsidi dan Pestisida).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada beberapa definisi standar keberhasilan program kartu tani menurut penyuluh yaitu:

1. Standar keberhasilan kartu tani adalah ketika seluruh petani sudah terdata dan otomatis masuk dalam SIMPI dan RDKK.
2. Ukuran keberhasilan kartu tani adalah ketika petani mampu mengaplikasikan kartu tani yaitu melakukan penebusan pupuk subsidi menggunakan kartu tani secara mandiri.
3. Standar keberhasilan kartu tani adalah apabila pendataan dan pengaplikasian kuat atau dapat dilaksanakan secara optimal.

Perbedaan-perbedaan pendefinisian standar keberhasilan program kartu tani yang disampaikan oleh penyuluh dikarenakan penyuluh memandang bahwa program kartu tani tidak hanya sebatas media penebusan pupuk subsidi tetapi juga bank data petani. Standar yang ditetapkan oleh penyuluh selaras dengan salah satu tujuan yang ditetapkan dalam SOP program kartu tani yaitu tepat sasaran. Walaupun demikian, fakta di lapangan menjelaskan bahwa belum semua petani di wilayah Kecamatan Bonang sudah mendapatkan kartu tani.

Koordinator penyuluh BPP Kecamatan Bonang menjelaskan bahwa ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam kesuksesan kartu tani walaupun menurutnya standar keberhasilan program kartu tani masih sulit didefinisikan karena kompleksitas permasalahan yang ada. Kesuksesan kartu tani dibentuk dari pelaksanaan program dan sosialisasi yang intensif. Permasalahan kartu tani di lapangan menunjukkan standar keberhasilan dan pemahaman SOP pelaksanaan kartu tani belum optimal diterapkan. Walaupun demikian, sebagian dari ketercapaian tujuan kartu tani adalah pendataan luas lahan secara jelas melalui SPPT. Selain itu, adanya kartu tani memberi perubahan setidaknya kuota pupuk subsidi per petani dapat terlihat. Secara kuantitatif tingkat keberhasilan program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang belum dapat dirumuskan secara jelas oleh penyuluh karena kompleksitas permasalahan dalam pelaksanaannya. Koordinator penyuluh BPP Kecamatan Bonang menjelaskan dalam pernyataannya tentang tingkat keberhasilan kartu tani yaitu:

*“belum tahu tingkat standar keberhasilan kartu tani secara pasti tapi pada dasarnya jika tingkat keberhasilan dibawah 50% berarti itu gagal kalau 100% berarti itu berhasil”*

Hal tersebut terlihat dari kondisi di lapangan bahwa belum semua petani terdaftar dalam pengusulan kartu tani, belum semua kartu tani yang tercetak terdistribusi kepada petani dan tidak semua kartu tani teraktivasi. Hal lain yang terlihat bahwa belum berhasilnya pelaksanaan program kartu tani adalah minat petani untuk melakukan penebusan pupuk subsidi dengan menggunakan kartu tani yang masih rendah. Kondisi tingkat keberhasilan program kartu tani yang belum optimal juga terlihat dari pernyataan pegawai KCP BRI unit Wedung sebagai berikut:

*“diSIMPI itu baru 50% yang sudah teraktivasi cuman secara fisiknya sudah ada lebih dari 50%”*

Keberhasilan kartu tani bagi pelaksana kebijakan yang lain seperti pengurus kelompok tani dan kepala desa adalah ketika pupuk subsidi dapat tercukupi saat dibutuhkan oleh petani. Perbedaan pandangan terkait standar keberhasilan tersebut sama halnya dengan perbedaan pola koordinasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Koordinasi tersebut masih didasarkan kepentingan terhadap tugas dan kewenangan pada tiap komponen pelaksana. Penyuluh melakukan koordinasi lebih sering kepada ketua kelompok tani dan kepala desa karena terkait pendataan petani dan pengusulan kartu tani. Penyuluh tidak secara intensif melakukan koordinasi dengan KPL karena dianggap tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang dalam pendataan petani.

Koordinasi antar komponen pelaksana kebijakan kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang dilakukan dengan media *group* WA (*WhatsApp*) dan via langsung (tatap muka). *Group* WA kartu tani dimanfaatkan untuk

menyampaikan permasalahan lapangan. Sayangnya, keaktifan *group* WA tersebut hanya ketika lagi dibutuhkan, kurangnya materi pembahasan *group* menjadikan *group* kartu tani kurang aktif. Penyuluh BPP Kecamatan Bonang menjelaskan bahwa banyaknya *group* WA terkait program kartu tani dirasa kurang efektif. Respon atau tanggapan terhadap masalah yang disampaikan di *group* membutuhkan waktu lama dan relatif sama bentuk permasalahannya. Komponen yang masuk dalam *group* WA program kartu tani adalah komponen pelaksana maupun pengawas pendistribusian pupuk subsidi. Tim pengawas pupuk subsidi di tingkat desa meliputi kepala desa, poktan dan penyuluh sedangkan tingkat kecamatan itu penyuluh, polsek, koramil.